

INFOGRAFIS DATA APTIKA

TAHUN
2019-2023

Kata Pengantar



Semuel Abrijani Pangerapan

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

“

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebijakan
Selamat sejahtera bagi kita semua

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Infografis Data Aptika Tahun 2019-2023 ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Buku ini merupakan sebuah karya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang berisi tentang perkembangan atau dinamika data sektor aplikasi informatika di Indonesia. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Data internal diperoleh dari hasil pelaksanaan program kerja Ditjen Aptika, sedangkan data eksternal diperoleh dari berbagai lembaga dan institusi terkait.

Terbitnya Buku Infografis Data Aptika Tahun 2019-2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan informatif bagi pembaca tentang perkembangan data aplikasi informatika di Indonesia. Buku ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, praktisi, hingga masyarakat umum.

Kami sangat mengapresiasi penerbitan buku ini yang digagas oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika bersama dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen Aptika. Buku ini merupakan salah satu upaya Ditjen Aptika dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang aplikasi informatika di Indonesia.

Buku ini memang belumlah sempurna, namun kami berharap dapat memenuhi kebutuhan akan informasi tentang aplikasi informatika. Untuk itu, kami mohon kritik dan saran dari pembaca, sehingga ke depan penulisan buku ini menjadi lebih lengkap dan semakin bermanfaat sebagai sarana ilmu pengetahuan di bidang TIK.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semuel Abrijani Pangerapan

”



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab.1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Buku	2
1.2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Buku	3
Bab 2. Profil Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	4
2.1. Tupoksi Ditjen Aptika	5
2.2. Struktur Organisasi Kominfo dan Ditjen Aptika	6
2.3. Jumlah Pegawai Ditjen Aptika	8
2.4. Komposisi Pegawai Ditjen Aptika Berdasarkan Pendidikan	9
2.5. Komposisi Pegawai Ditjen Aptika Berdasarkan Generasi Umur	10
2.6. Komposisi Pegawai Ditjen Aptika Berdasarkan Jenis Kelamin	11
2.7. Komposisi Pegawai Ditjen Aptika Berdasarkan Masa Kerja	12
Bab 3. Pelindungan Data Pribadi (PDP)	13
3.1. Proses Penetapan UU Pelindungan Data Pribadi	14
3.2. Pelaksanaan Roadmap Pembentukan Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi (PPDP)	15
3.3. Pengendalian Pelindungan Data Pribadi	16
Bab 4. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	18
Infrastruktur	
4.1. Layanan Pusat Data Nasional	19
4.2. Layanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	22
4.3. Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	24
Aplikasi	
4.4. Layanan SPBE SP4N LAPOR	26
4.5. PNS MAIL	28
4.6. Layanan SPBE Srikandi	29
Clearance TIK	
4.7. Clearance TIK	30
Bab 5. Perusahaan Rintisan Digital	32
5.1. 1000 Startup Digital	33
5.2. Startup Studio Indonesia	35
5.3. Indonesia Entrepreneur TIK (IDENTIK 2023)	37
5.4. HUB.ID Accelerator	38
5.5. HUB.ID Summit	39
Bab 6. Industri Gim	40
6.1. Layanan Klasifikasi GIM (IGRS)	41
6.2. Indonesia Game Developer eXchange (IGDX)	42
Bab 7. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)	43
7.1. Layanan PSE Publik	44
7.2. Layanan PSE Privat	48
Bab 8. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)	52
8.1. Layanan PSRE	53
Bab 9. Literasi Digital Indonesia	55
9.1. Literasi Digital Indonesia	56
9.2. Capaian Literasi Digital Sektor Masyarakat	57
9.3. Capaian Literasi Digital Sektor Pemerintahan	58
9.4. Capaian Literasi Digital Sektor Pendidikan	59

DAFTAR ISI

Bab 10. Pendampingan Peningkatan TIK oleh Ditjen Aptika Kepada Pelaku Usaha di Indonesia	60
10.1. Adopsi Teknologi Digital Sektor Pariwisata	61
10.2. Adopsi Teknologi Digital Sektor Pertanian	63
10.3. Adopsi Teknologi Digital Sektor Maritim	65
10.4. Adopsi Teknologi Digital Sektor Logistik	67
10.5. Adopsi Teknologi Digital UMKM	69
Bab 11. Pendampingan Peningkatan TIK oleh Ditjen Aptika Untuk Wilayah di Indonesia	74
11.1. Adopsi Teknologi Digital Sektor Pendidikan	75
11.2. Adopsi Teknologi Digital Sektor Kesehatan	77
11.3. Gerakan Menuju Kota Cerdas Indonesia	79
Bab 12. Layanan Aduan Masyarakat	80
12.1. Pengendalian Konten	81
12.2. Pengendalian Transaksi Elektronik (Cek Rekening dan Aduan Nomor)	84
Bab 13. Penetapan Regulasi TIK	88
13.1. Rekapitulasi Regulasi yang Ditetapkan oleh Ditjen Aptika	89
Bab 14. Kerjasama Ditjen Aptika	91
14.1. Kerjasama Ditjen Aptika	92
Bab 15. Penghargaan Ditjen Aptika	93
15.1. Penghargaan Ditjen Aptika	94
Bab 16. Perkembangan Bidang TIK Kedepan	95
16.1. Peluang Lapangan Kerja Dibidang TIK di Indonesia	96
16.2. Peningkatan Teknologi AI Dunia dan Regulasi yang Mengatur	100
16.3. Tantangan UMKM dalam eCommerce	102
16.4. Kondisi Indeks Literasi Digital Indonesia	103
16.5. Kondisi Indeks Literasi Digital Dunia	104



BAB 1

Pendahuluan





LATAR BELAKANG

Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Salah satu unit kerja yang turut berkontribusi dalam mewujudkan visi tersebut adalah Ditjen Aptika.

Ditjen Aptika memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika. Ditjen Aptika juga memiliki tanggung jawab yang luas dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi untuk mendukung berbagai sektor, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat umum. Sebagai bagian dari Kemkominfo, Ditjen Aptika ini telah melaksanakan berbagai program kerja untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan buku Infografis Data Aptika Tahun 2019-2023 ini menjadi sarana komunikasi visual yang efektif untuk menyampaikan capaian-capaian tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum. Melalui infografis, informasi yang kompleks dapat disajikan dengan cara yang mudah dipahami, memudahkan penerima pesan untuk mengidentifikasi dan menghargai kontribusi Ditjen Aptika.

Dengan demikian, penyusunan buku infografis tentang capaian program kerja Ditjen Aptika Kemkominfo diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam mendukung upaya komunikasi yang efektif dan transparan terkait prestasi dan kontribusi lembaga dalam meningkatkan sektor aplikasi informatika di Indonesia.



TUJUAN DAN MANFAAT

“Tujuan

dari penyusunan Buku
Infografis Data Ditjen Aptika
Tahun 2019-2023:



Menyajikan data yang dihasilkan oleh program-program Ditjen Aptika dalam bentuk infografis sebagai data dukung dalam membuat kebijakan.



Menyajikan informasi tentang jumlah pengguna layanan publik yang diberikan oleh Ditjen Aptika dalam bentuk infografis.



Menyajikan data bidang aplikasi informatika yang berasal dari sumber eksternal untuk memberikan gambaran dinamika data bidang aplikasi informatika.



BAB 2

Profil Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika



TUPOKSI DITJEN APTIKA

Tugas Pokok Ditjen Aptika

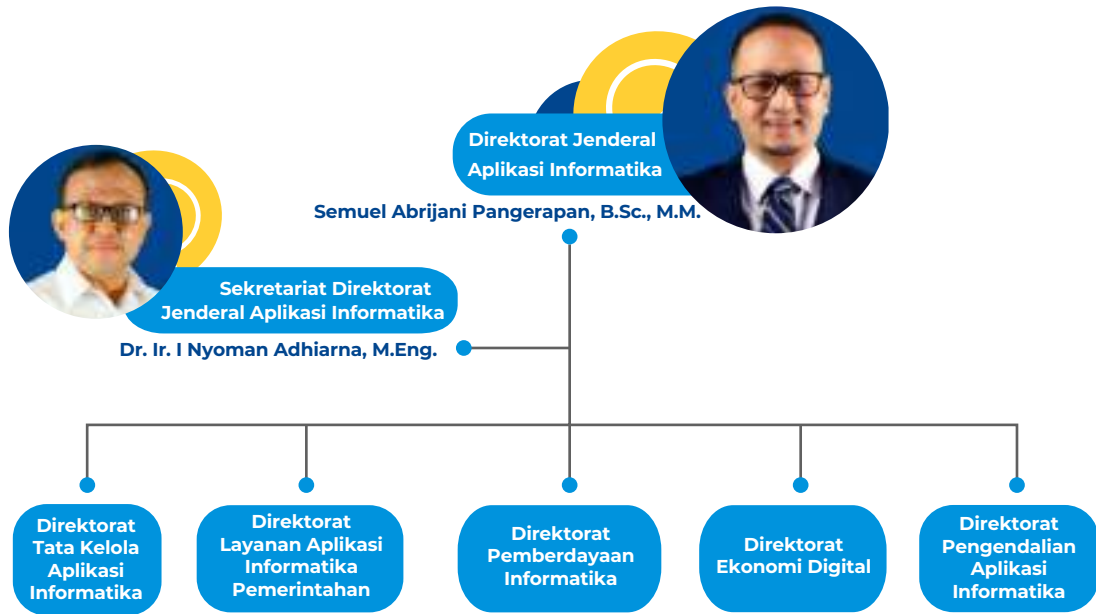
Ditjen Aptika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.



Fungsi Ditjen Aptika

- Perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan layanan aplikasi informatika pemerintahan dan ekonomi digital, pemberdayaan informatika, dan pengendalian aplikasi informatika.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan layanan aplikasi informatika pemerintahan dan ekonomi digital, pemberdayaan informatika, dan pengendalian aplikasi informatika.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatakelolaan layanan aplikasi informatika pemerintahan.
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatakelolaan layanan aplikasi informatika pemerintahan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan layanan aplikasi informatika pemerintahan dan ekonomi digital, pemberdayaan informatika, dan pengendalian aplikasi informatika.
- Pelaksanaan administrasi Ditjen Aptika.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN APTIKA



Tugas dan Fungsi

● Sekretariat Direktorat Jenderal

Bertugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Aptika.

● Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika

Bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penata kelolaan aplikasi informatika, serta pencatatan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

● Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

Bertugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan.

● Direktorat Ekonomi Digital

Bertugas melaksanakan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi digital.

● Direktorat Pemberdayaan Informatika

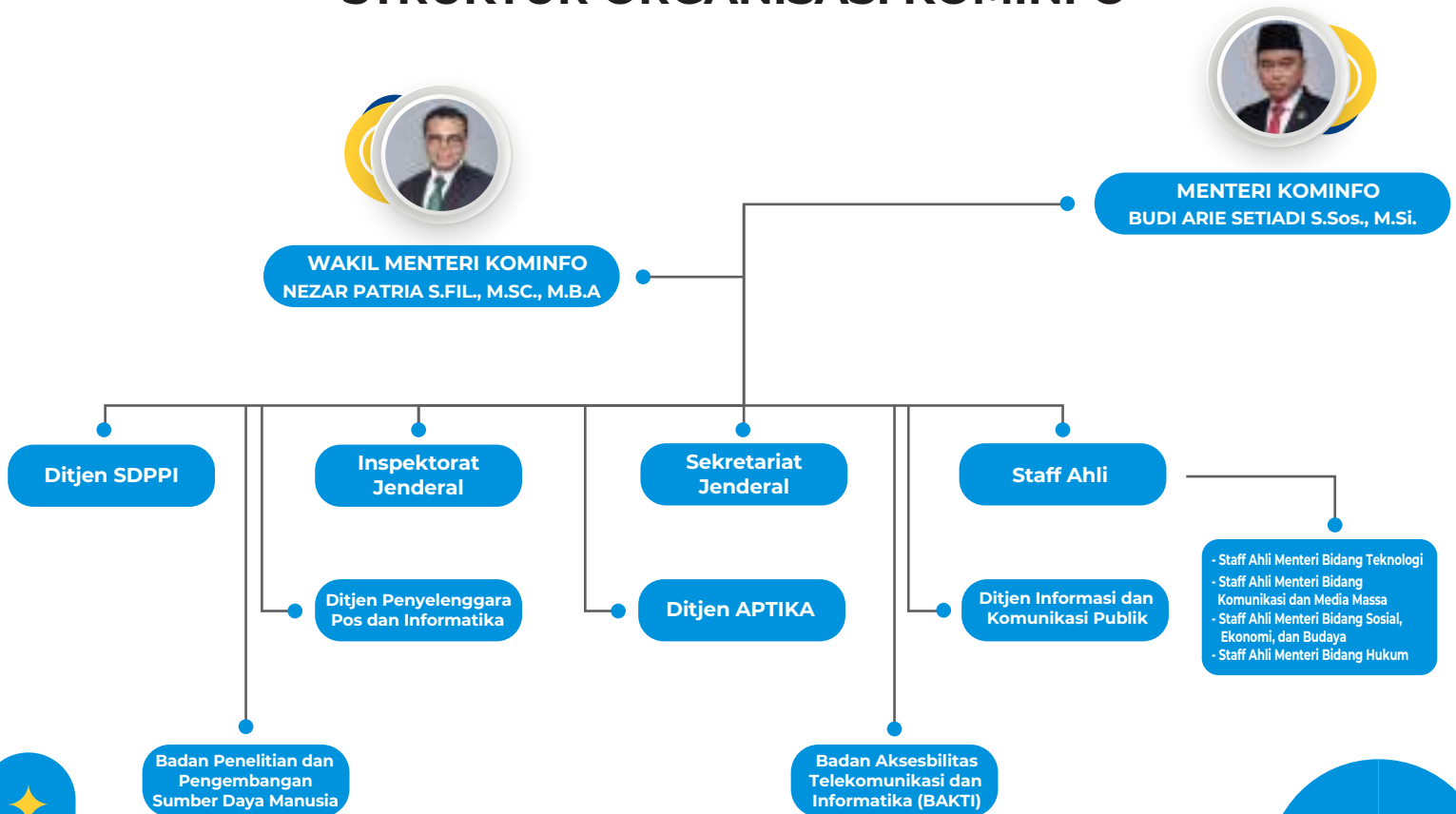
Bertugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan informatika.

● Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika

Bertugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian aplikasi informatika.



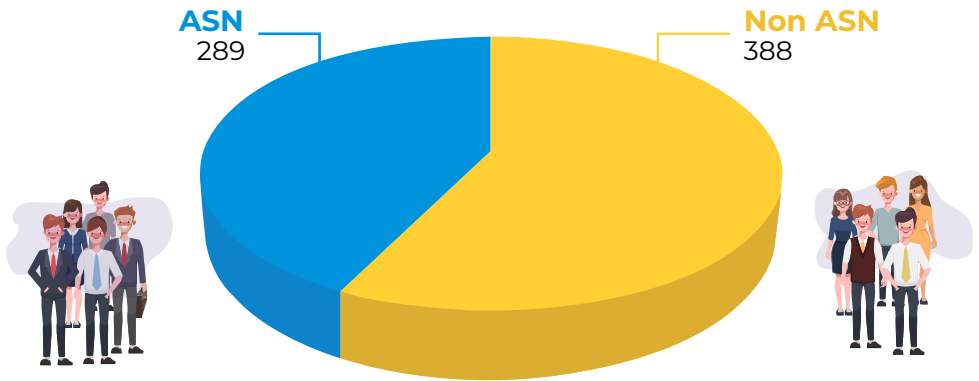
STRUKTUR ORGANISASI KOMINFO



KOMPOSISI PEGAWAI DITJEN APTIKA

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Berdasarkan Golongan



Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika



Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika



Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan



Direktorat Ekonomi Digital



Direktorat Pemberdayaan Informatika



Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika

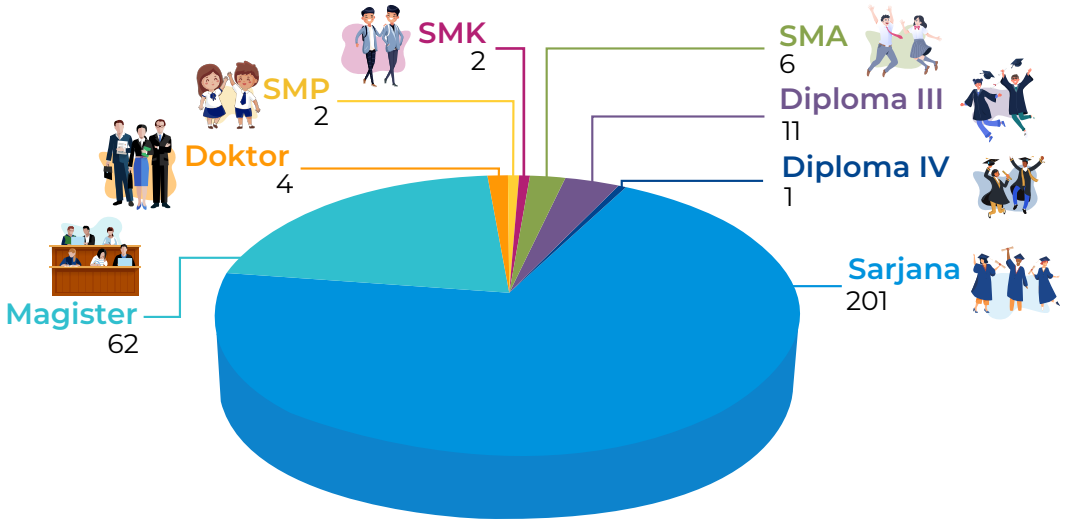


■ ASN ■ Non ASN

KOMPOSISI PEGAWAI ASN DITJEN APTIKA

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Berdasarkan Pendidikan



Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika



Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika



Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan



Direktorat Ekonomi Digital



Direktorat Pemberdayaan Informatika



Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika

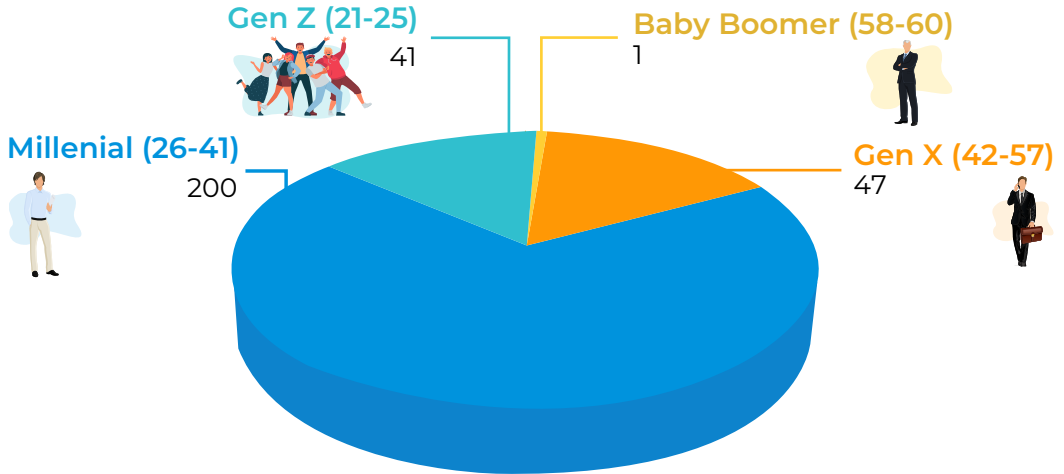


■ Diploma IV ■ Sarjana ■ Magister ■ Doktor
■ Diploma III ■ SMA ■ SMK ■ SMP

KOMPOSISI PEGAWAI ASN DITJEN APTIKA

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Berdasarkan Generasi Usia



Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika



Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika



Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan



Direktorat Ekonomi Digital



Direktorat Pemberdayaan Informatika



Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika

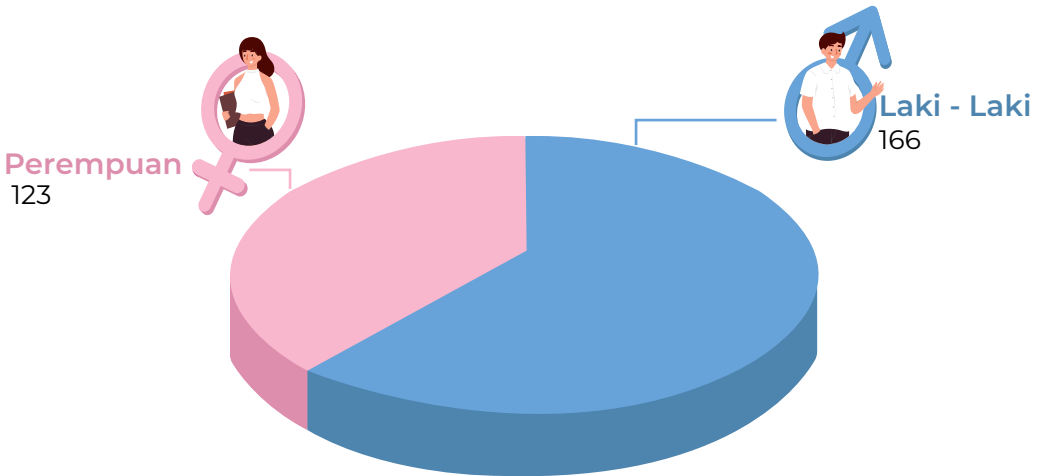


■ Gen Z ■ Millennial ■ Gen X ■ Baby Boomer

KOMPOSISI PEGAWAI ASN DITJEN APTIKA

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Berdasarkan Jenis Kelamin



Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika



Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika



Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan



Direktorat Ekonomi Digital



Direktorat Pemberdayaan Informatika



Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika

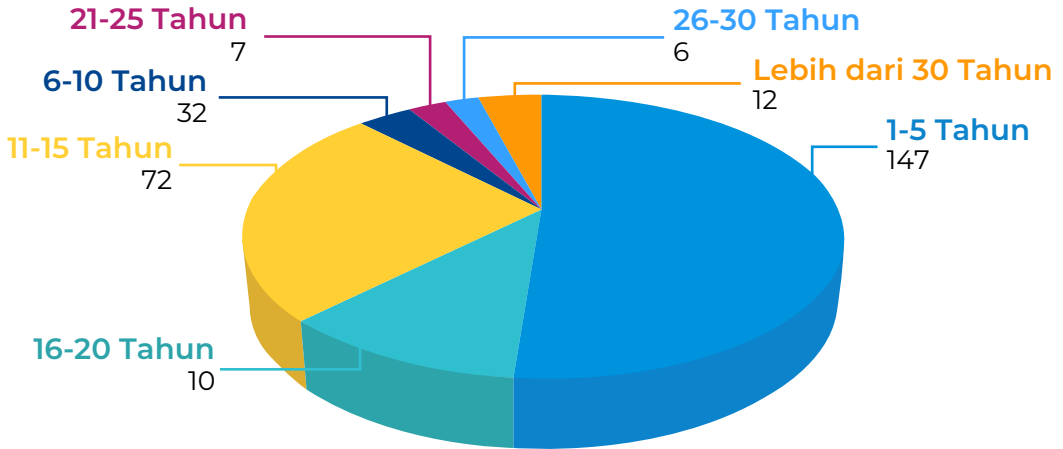


Perempuan Laki-laki

KOMPOSISI PEGAWAI ASN DITJEN APTIKA

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Berdasarkan Masa Kerja



Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika



Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika



Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan



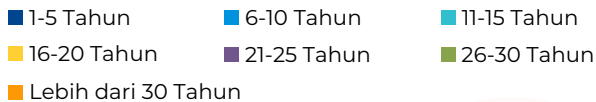
Direktorat Ekonomi Digital



Direktorat Pemberdayaan Informatika



Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika



-
-
-
-
-

BAB 3

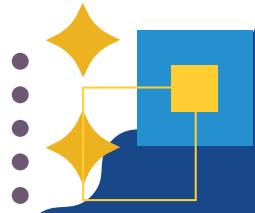
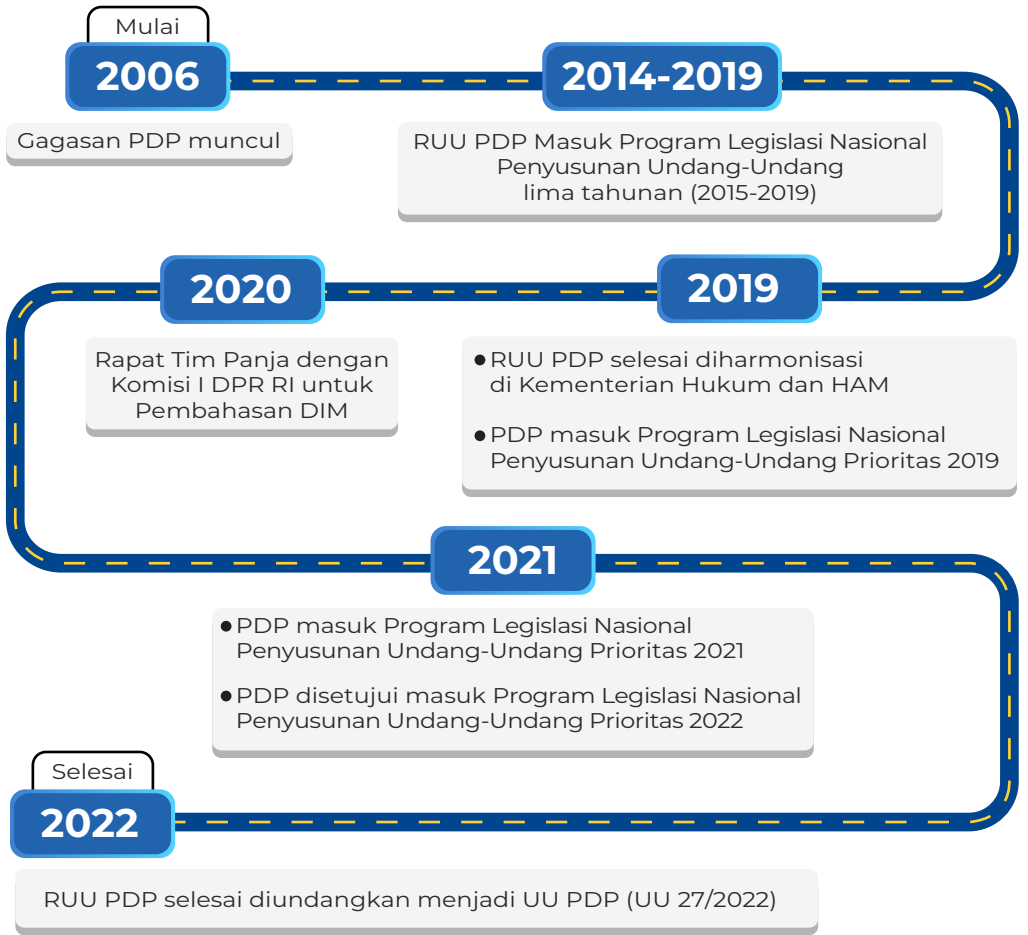
Pelindungan Data Pribadi (PDP)



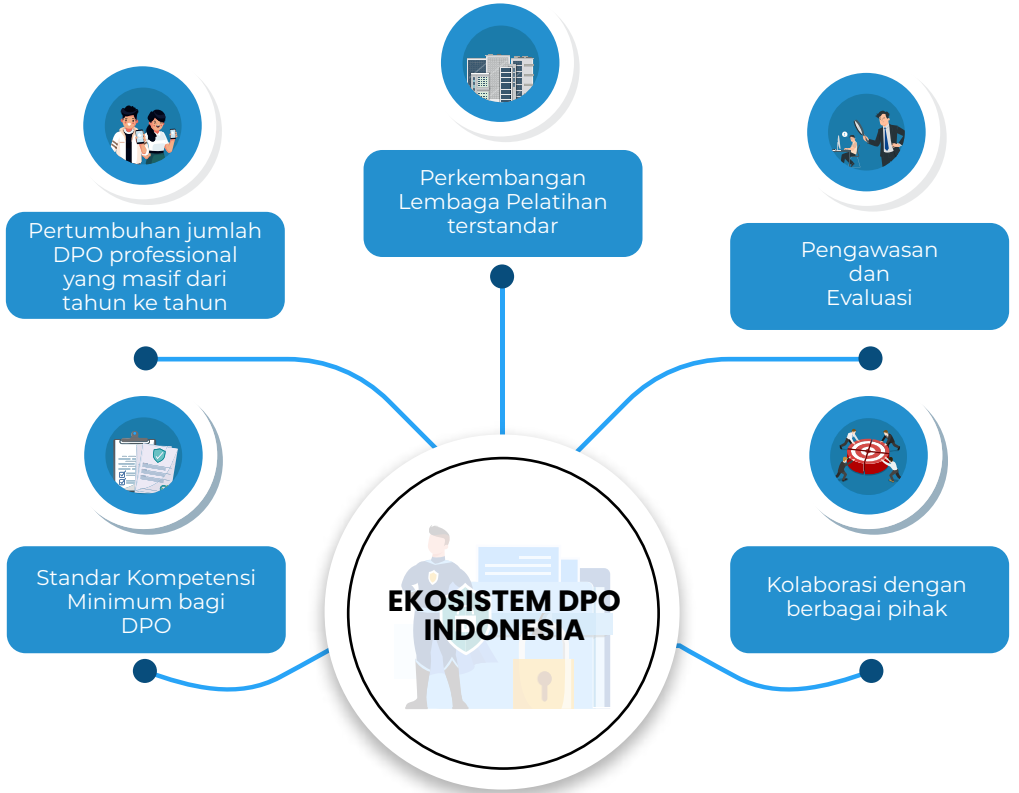
-
-
-
-
-



ALUR PROSES PEMBENTUKAN UU PDP



PELAKSANAAN ROADMAP PEMBENTUKAN PEJABAT/PETUGAS PELINDUNG DATA PRIBADI (PPDP)



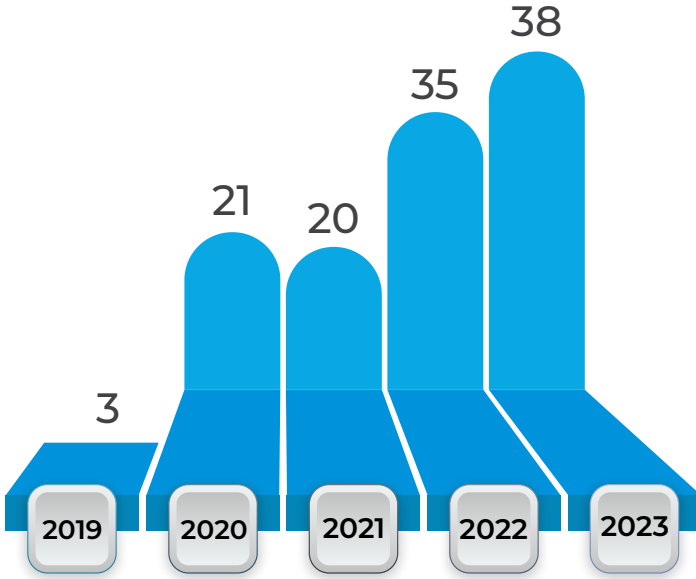
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grand Design Ekosistem DPO Indonesia	Implementasi Grand Design Ekosistem DPO Indonesia	Pengembangan dan Penerapan DPO Indonesia	Pengembangan dan Penerapan DPO Indonesia (2)	Pengawasan	



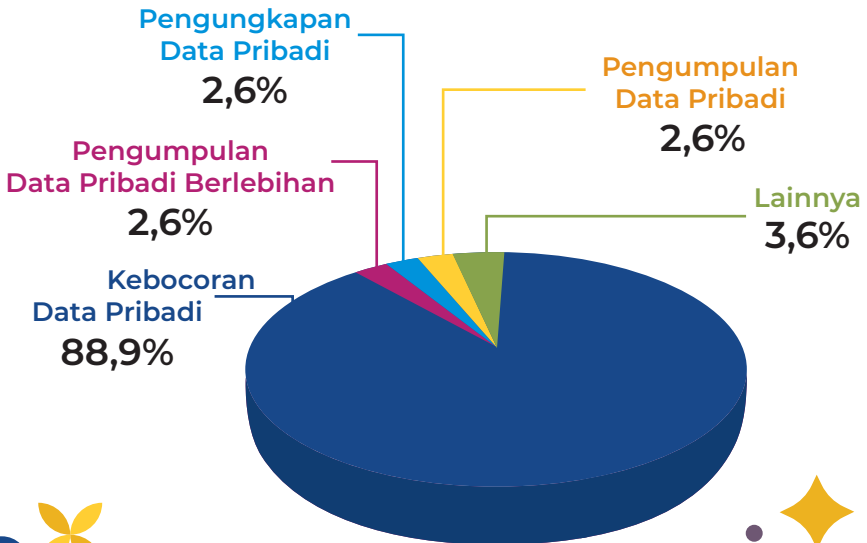
PENGENDALIAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PERIODE DATA NOVEMBER 2023

Trend Kasus PDP



Berdasarkan Jenis Pelanggaran



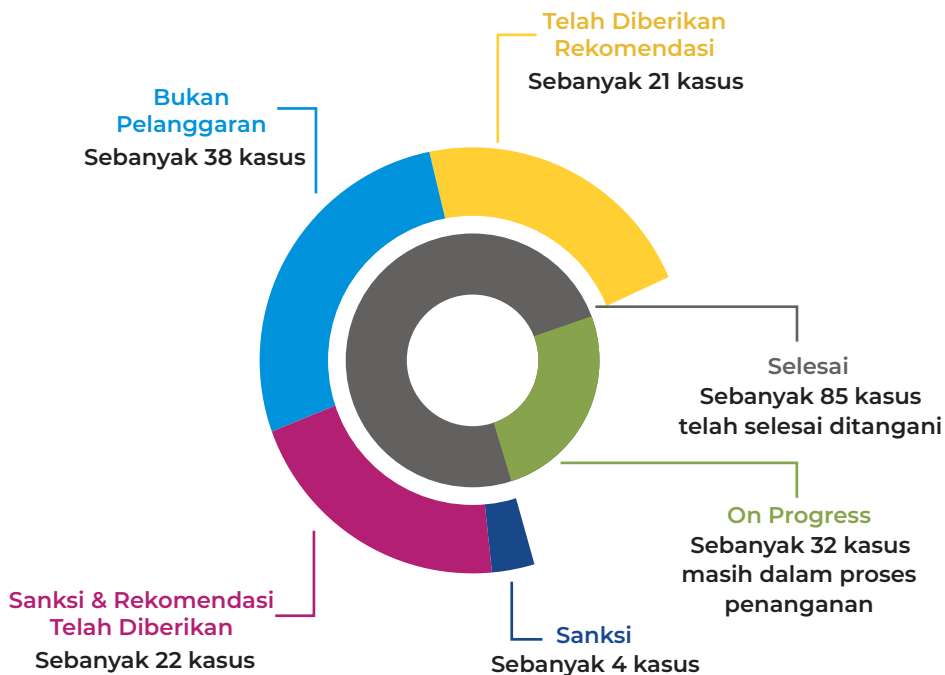


PENGENDALIAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PERIODE DATA NOVEMBER 2023



Penanganan Dugaan Pelanggaran PDP



Berdasarkan Jenis PSE

79 PSE Privat

38 PSE Publik





BAB 4

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

LAYANAN PUSAT DATA NASIONAL

PERIODE DATA SEPTEMBER 2023

Dasar Hukum Pelaksanaan PDN

Perpres 95/2018
tentang Sistem Pemerintahan
Berdasarkan Elektronik (SPBE).

”

Pusat Data Nasional

merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

Manfaat Pusat Data Nasional

Kesetaraan dan pemerataan fasilitas digital di setiap daerah



Data dijamin keamanannya karena dikelola secara professional

Meminimalisir terjadinya duplikasi data



Manfaat Pusat Data Nasional



Mempercepat integrasi dan konsolidasi satu data Indonesia

Efisiensi anggaran



Menjamin keamanan dan kedaulatan data NKRI

LAYANAN PUSAT DATA NASIONAL

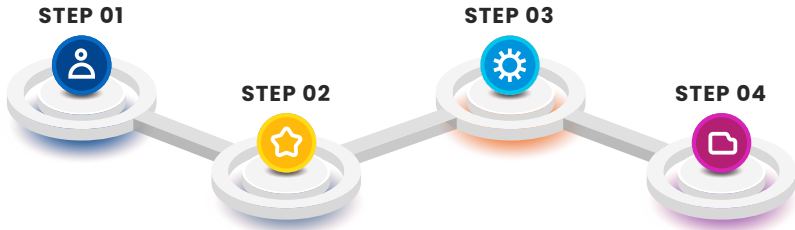
PERIODE DATA SEPTEMBER 2023

Tahapan Pemanfaatan PDN

Pembuatan akun dan pengajuan permohonan ke **pdn.layanan.go.id**

*lampirkan surat penunjukkan PIC di PDN, kartu pegawai, surat permohonan resmi dari instansi

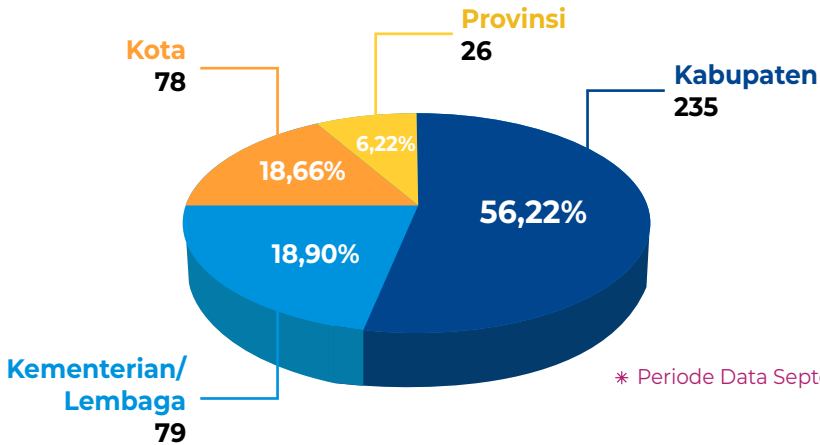
Penyediaan Infrastruktur



Assesment oleh tim Kemkominfo

Pemanfaatan layanan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah

Instansi Pengguna Layanan Cloud PDN

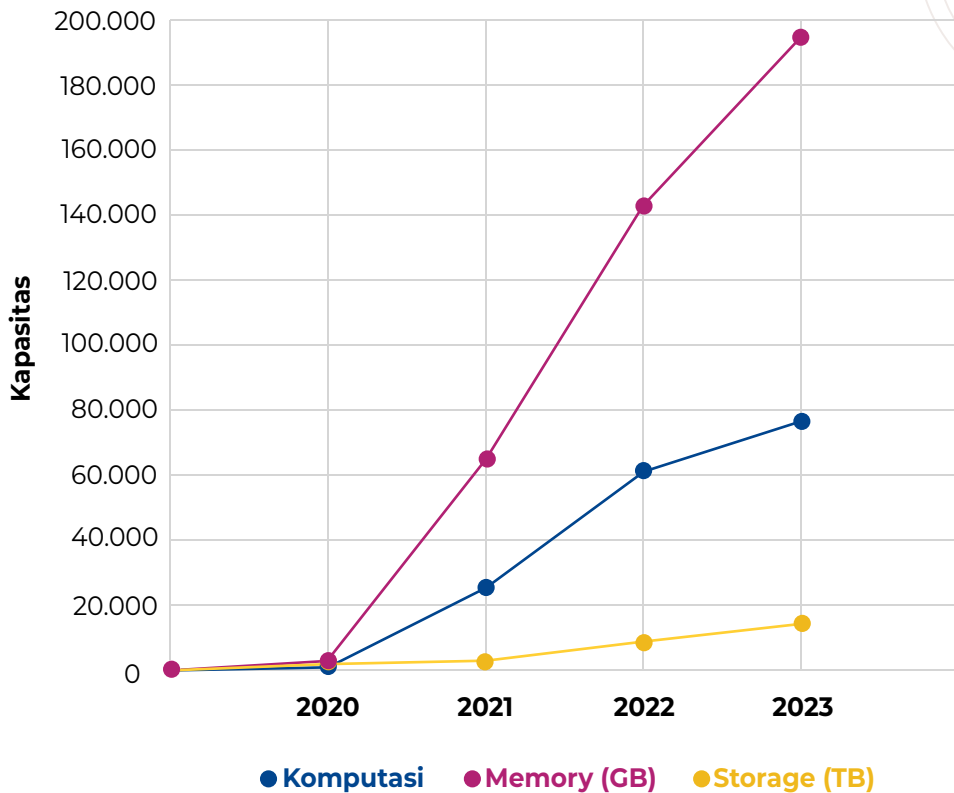


* Periode Data September 2023

LAYANAN PUSAT DATA NASIONAL

PERIODE DATA SEPTEMBER 2023

Trend Permintaan Kapasitas 2020-2022



JARINGAN INTRA PEMERINTAH

PERIODE DATA NOVEMBER 2023

Dasar Hukum Pelaksanaan JIP

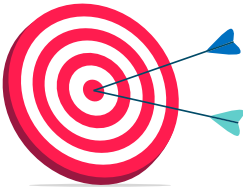
Perpres 95/2018
tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE).

”

Jaringan Intra Pemerintah

merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Manfaat JIP



- Mengamankan trafik data yang bersifat sensitif/rahasia/kritikal sebagai sarana pertukaran data/informasi umum antar instansi pemerintah.
- Pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan yang handal melalui penyediaan alternatif kanal (transmisi dan komunikasi) antar instansi pemerintah jika terjadi pemutusan akses internet, maupun gangguan lainnya.

Peran JIP



- Merupakan jaringan tertutup dan tidak bisa diakses khalayak luas, sehingga pertukaran data dijamin aman.
- Komunikasi data akan terenkripsi secara site-to-site tunneling, sehingga jalur komunikasi tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.
- Kemudahan interkoneksi dengan Kementerian, Lembaga, dan Provinsi lain.

JARINGAN INTRA PEMERINTAH

PERIODE DATA NOVEMBER 2023

Alur Permohonan Jaringan Intra Pemerintah

User membuat tiket untuk pengajuan layanan dengan mengakses pdn.layanan.go.id

User memilih menu **Buat Permintaan**, lalu pilih **Sub-Category Network**, lalu memilih **Item Category Jaringan Intra Pemerintah** (*Bandwith, Nama JIP*)

Tim Kemkominfo me-review apakah verifikasi kebutuhan user sudah sesuai dengan scope



User memilih menu **REQUEST** atau **Buat Permintaan** di portal

Upload dokumen **Pre-request** (surat permintaan fasilitasi JIP dengan melampirkan *traffic MRTG* ke NOC atau *server K/L/Pemprov*)

Jika sudah *approved*, Tim Kemkominfo akan melakukan permintaan user

Instansi yang Telah Terhubung Dalam Layanan JIP (Kumulatif)



SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (SPLP)

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Dasar Hukum Pelaksanaan SPLP

Perpres 95/2018
tentang Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE).

Perpres 39/2019
tentang Satu Data
Indonesia (SDI).

Perpres 19/2020
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
(RPJMN).

”

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

merupakan bagian dari Infrastruktur SPBE Nasional bersama Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP).

Fitur SPLP

01

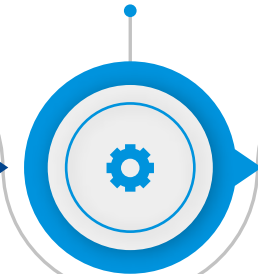
ENTERPRISE
SERVICE BUS
(ESB)



Sebagai tools
integrasi dan
komunikasi
antar services

02

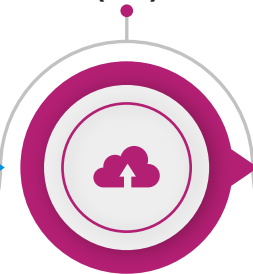
API MANAGEMENT
(AM)



Sebagai tools
manajemen
layanan antar
muka aplikasi

03

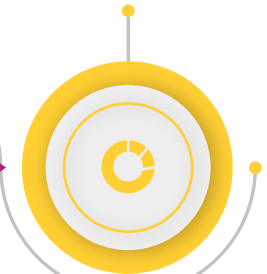
EXTRACT
TRANSFORM
LOAD
(ETL)



Sebagai tools
dalam melakukan
konsolidasi dan
perpindahan
dengan penyesuaian
format data

04

SINGLE SIGN
ON (SSO)

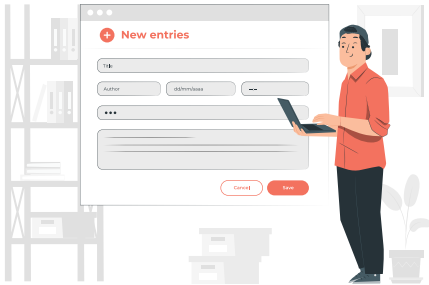


Sebagai tools
penghubung layanan
untuk memudahkan
user dalam membuka
berbagai layanan
dengan satu kali login

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (SPLP)

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Alur Pengajuan Layanan SPLP



01

Ajukan surat tertulis yang ditujukan ke Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah tentang pemanfaatan Layanan SPLP

02

Klik contoh surat permohonan SPLP di:
s.id/splp-nasional

03

Kirim ke:
helpdesk.splp@layanan.go.id

Pengguna SPLP

Total User

(jumlah pengguna layanan splp)

934

Total Tenant

(jumlah sistem penghubung layanan splp)

339

LAYANAN SPBE SP4N LAPOR

PERIODE DATA SEPTEMBER 2023

Tujuan SPBE SP4N Laporan

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “NO WRONG DOOR POLICY” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N Lapor bertujuan agar :

01

Penyelenggara dapat **mengelola pengaduan** dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

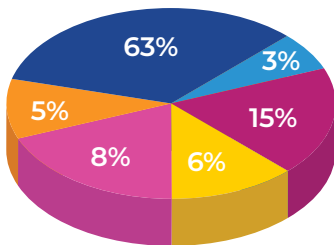
02

Penyelenggara **memberikan akses** untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

03

Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jumlah Instansi Terhubung SP4N Laporan



- Pemkab : 425
- Pemkot : 98
- Lembaga Pemerintah : 56
- Pemprov : 40
- Kementerian : 37
- Lembaga Negara : 21

LAYANAN SPBE SP4N LAPOR

PERIODE DATA SEPTEMBER 2023

Jumlah Laporan Berdasarkan Klasifikasi

- Pengaduan Berkadar Pengawasan : 1.113.114 Laporan
- Permintaan Informasi : 356.755 Laporan
- Aspirasi : 64.717 Laporan
- Pengajuan RAPS : 238 Laporan
- Pelaporan Pelanggaran : 1.072 Laporan
- Pengaduan Tidak Berkadar Pnegawasan : 81.989 Laporan

Pengguna Aktif SP4N Lapor Berdasarkan Gender

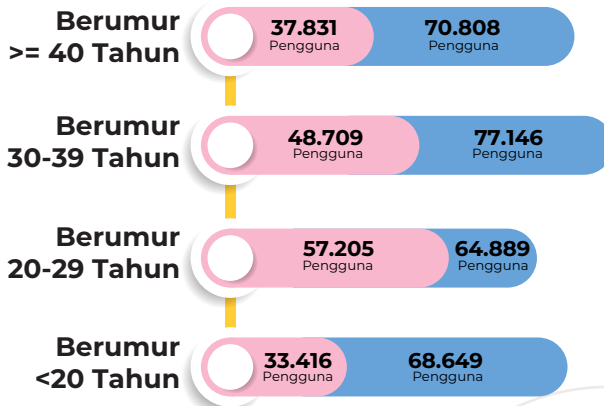


Laki - Laki :
986.004 Pengguna



Perempuan :
204.340 Pengguna

Pengguna Aktif SP4N Lapor Berdasarkan Umur



● Laki - laki ● Perempuan Tidak Mengisi Umur
1.550.884

PNS MAIL

Dasar Hukum PNS Mail

Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor 06 Tahun 2013



PNS Mail

Penyediaan layanan surat elektronik (email) secara khusus untuk ASN dan perangkat desa. Target pengguna ASN dan perangkat desa di Indonesia.

Alur Permohonan Penggunaan Aplikasi untuk K/L/D



STEP 01

Pendaftaran akun dapat dilakukan melalui Helpdesk di:

✉ servicedesk.layanan.go.id

📞 Whatsapp: 081111124678

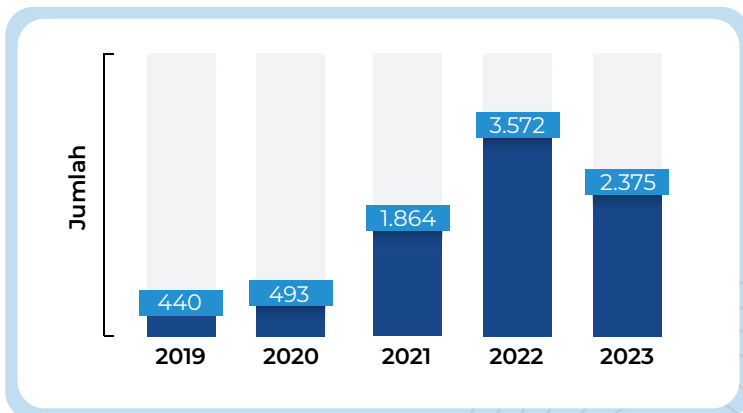


STEP 02

Berkas yang dibutuhkan:

- ASN:
Data diri dan Scan Kartu Pegawai.
- Perangkat Desa:
Scan SK pengangkatan perangkat desa.

Grafik Jumlah Pengguna PNS Mail



LAYANAN SPBE SRIKANDI

PERIODE DATA 7 DESEMBER 2023

Dasar Hukum SPBE Srikandi



Perpres 95 Tahun 2018

tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik.



Keputusan Menteri PANRB 679 Tahun 2020

tentang Aplikasi Umum
Bidang Kearsipan Dinamis.



SPBE SRIKANDI

Penetapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis ini dimaksudkan sebagai dasar acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Tujuan



- ▲ Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan di Bidang Kearsipan Dinamis yang berkualitas dan terpercaya di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- ▲ Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan Kearsipan Dinamis berbasis elektronik.
- ▲ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE Bidang Dinamis di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jumlah Pengguna SPBE Srikandi



Instansi

599



Unit Kerja

343,437



User Aktif

0

CLEARANCE TIK

Alur Proses Evaluasi Anggaran SPBE Clearance Belanja TIK

01



Menerima pengajuan permohonan clearance dari K/L

Program/Kegiatan :
- Rincian Output (RO)
- Komponen Rincian Output (KRO)

02



Verifikasi Oleh Tim Teknis.

03



Persetujuan Oleh Tim Teknis.

05



Proses selanjutnya adalah pemberian rekomendasi.

04



Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke K/L pengaju revisi. Jika disetujui maka lanjut proses selanjutnya.

06



Setelah diberikan rekomendasi, kemudian dilakukan proses rekapitulasi rekomendasi untuk disusun rekomendasi clearance sementara.

07



Pembahasan rekomendasi clearance sementara bersama K/L pemohon clearance.

08

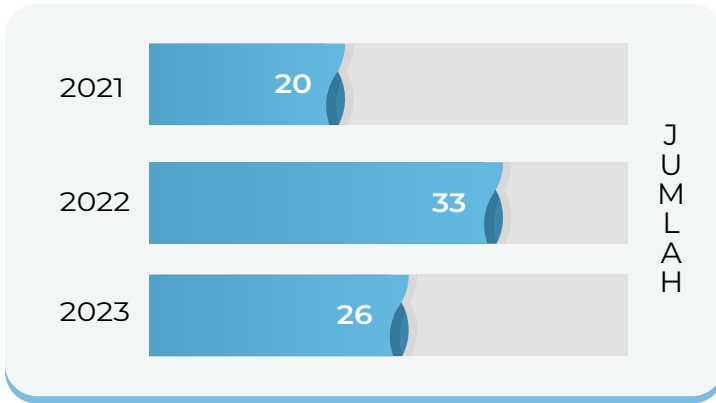


Penyusunan rekomendasi clearance (tetap) sesuai hasil pembahasan bersama tim teknis clearance dengan K/L pemohon clearance.

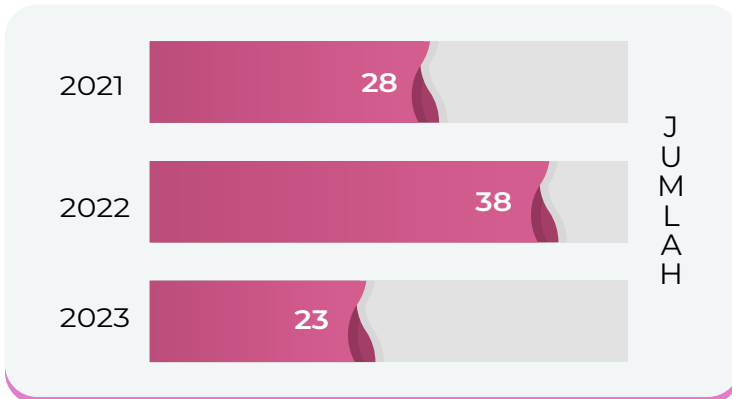
CLEARANCE TIK

Jumlah K/L yang Telah Mengajukan Clearance Belanja TIK

KEMENTERIAN

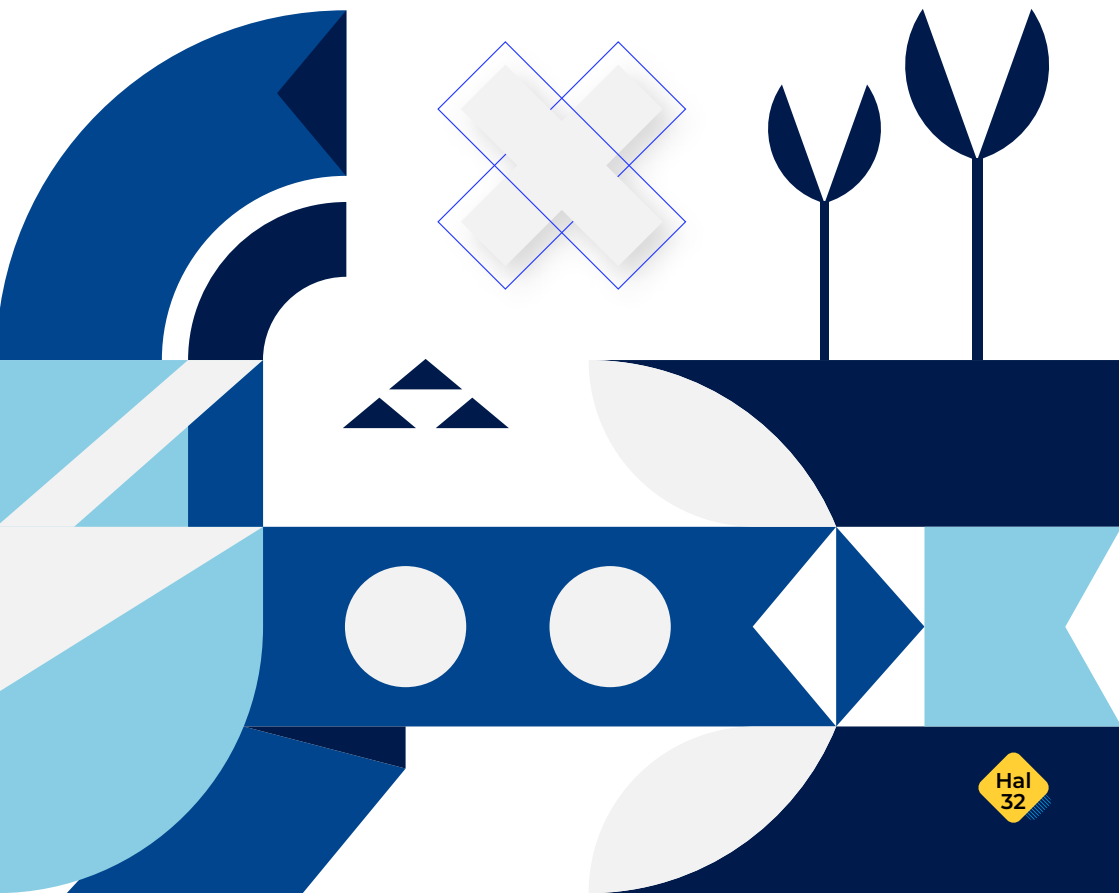


LEMBAGA



BAB 5

Perusahaan Rintisan Digital



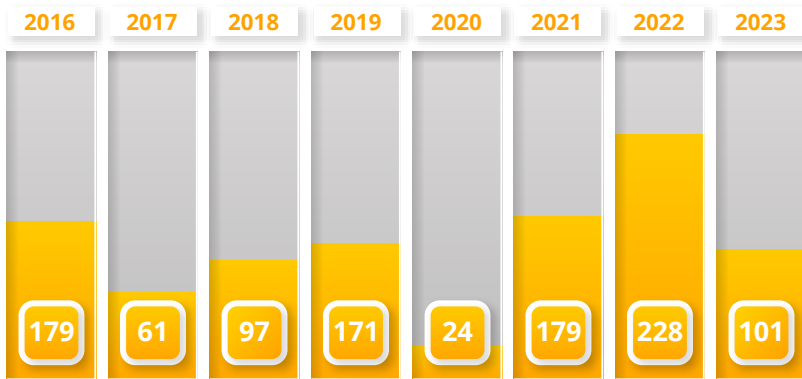
1000 STARTUP DIGITAL

PERIODE DATA TAHUN 2023

Program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital

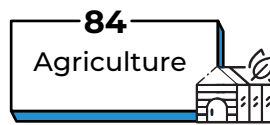
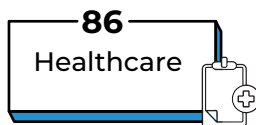
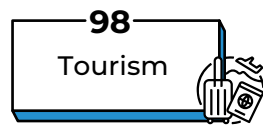
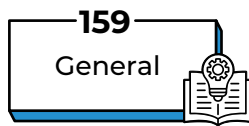
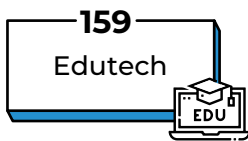
merupakan program pembinaan bagi masyarakat yang ingin membuat solusi teknologi bagi berbagai permasalahan di Indonesia dengan membentuk startup digital.

Jumlah Pembentukan Startup Tahun 2016-2023



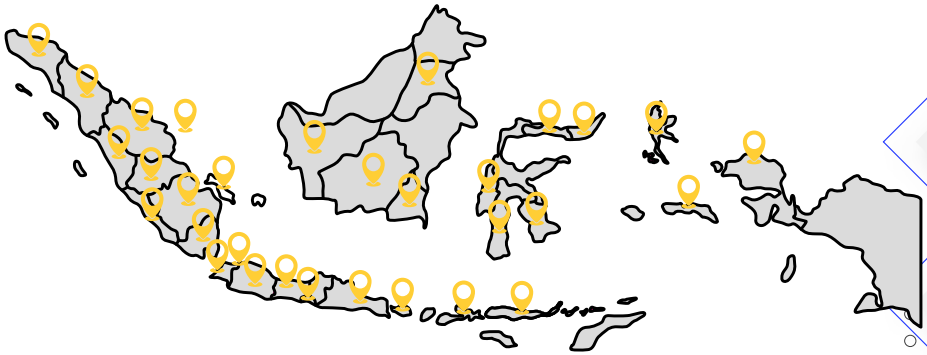
Jumlah Startup

Pembentukan Startup Digital Berdasarkan 5 Sektor Terbanyak



1000 STARTUP DIGITAL

Peta Sebaran Pembentukan Startup Digital Tahun 2023



Lokasi/HUB	Jumlah
Hub 1 : Sumatera Utara, mencakup Provinsi Aceh	6
Hub 2 : Riau & Sumatera Barat, mencakup Provinsi Bengkulu	11
Hub 3 : Kepulauan Riau, mencakup Provinsi Jambi	6
Hub 4 : Sumatera Selatan, mencakup Provinsi Lampung	9
Hub 5 : Kalimantan Barat, mencakup Provinsi Kalimantan Utara	6
Hub 6 : DKI Jakarta & Banten, mencakup Provinsi Kalimantan Tengah	10
Hub 7 : Jawa Barat, mencakup Provinsi Kalimantan Selatan	10
Hub 8 : Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, mencakup Provinsi Bangka Belitung	12
Hub 9 : Jawa Timur, mencakup Provinsi Maluku Utara	11
Hub 10: Bali & NTB, mencakup Provinsi Maluku	5
Hub 11 : Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara, mencakup Provinsi Sulawesi Barat	5
Hub 12: Sulawesi Utara, mencakup Provinsi Gorontalo	5
Hub 13: Nusa Tenggara Timur, mencakup Provinsi Papua Barat	5
Total	101

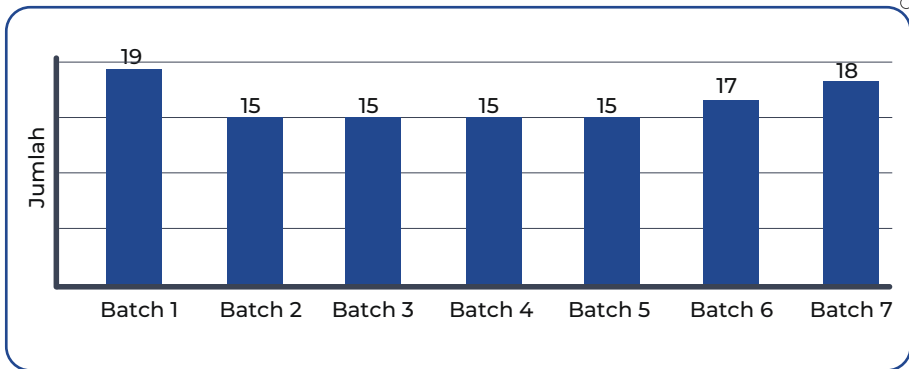
STARTUP STUDIO INDONESIA

PERIODE DATA BATCH 7

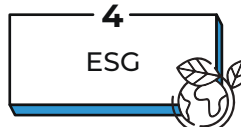
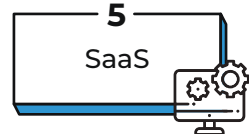
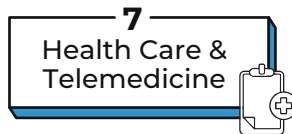
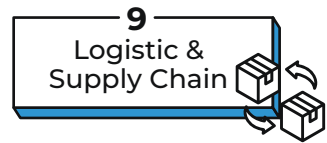
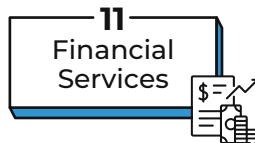
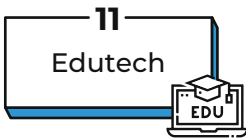
Startup Studio Indonesia

adalah sebuah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi startup digital yang memiliki traction menjanjikan dan founder potensial untuk mencapai product-market fit. Startup digital yang mengikuti program ini akan mengikuti serangkaian pendampingan dan dimonitoring perkembangannya selama 12 bulan dengan pengukuran 4 key metriks yaitu peningkatan pendapatan, jumlah pengguna, jumlah karyawan yang dipekerjakan, atau telah mendapatkan pendanaan awal.

Jumlah Startup Digital Aktif Berdasarkan Batch



Startup yang Difasilitasi Berdasarkan Sektor



STARTUP STUDIO INDONESIA

Peta Sebaran SSI



Indonesia

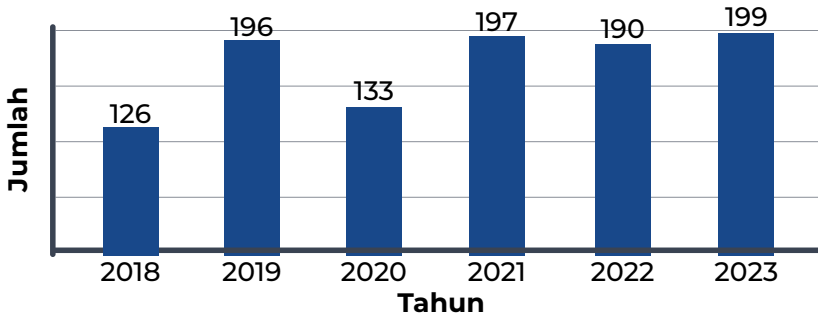
- Jakarta	: 71	- Bekasi	: 1
- Bandung	: 8	- Bogor	: 1
- Tangerang	: 3	- Depok	: 1
- Banten	: 2	- Bogor	: 1
- Surabaya	: 2	- Jawa Timur	: 1
- Bali	: 1		

INDONESIA ENTREPRENEUR TIK (IDENTIK 2023)

Indonesia Entrepreneur TIK

merupakan transformasi dari program INAICTA (Indonesia ICT Award) serta ID.UP (Indonesia Up) yang merupakan sebuah ajang kompetisi TIK yang ditujukan untuk menggali produk TIK karya anak bangsa terbaik dan dapat bersaing di tingkat regional atau internasional.

Jumlah Peserta IdentIK 2018-2023



Daftar Pemenang IdentIK 2023 Berdasarkan Kriteria

Inovasi Teknologi Konten Digital

- Hexcape
- SheviaFire
- Kartu Tahu
- Folka
- Fit Batik

Digital Inclusivity

- WebApps Internet Baik
- Wonderjack
- Voiye
- MooApps
- Difabike

Digital Startup

- Tracco
- Prospekin
- CHASAFRIEND
- BETUKANG.ID
- KOMOBOT 1.0

Digital Innovation

- Antasena v2.0 Decision Support System
- Votergate
- Boboko
- Arnesys
- Multi-Purpose Portable Data Collector for Conducting Underwater Research Based Artificial Intelligent.

Public Sector

- OpenSID
- Sehat IndonesiaKu
- e-Safety
- Sistem Aplikasi KEK
- SiPakDE ATIGA
- DIGMENTABEL

Private Sector

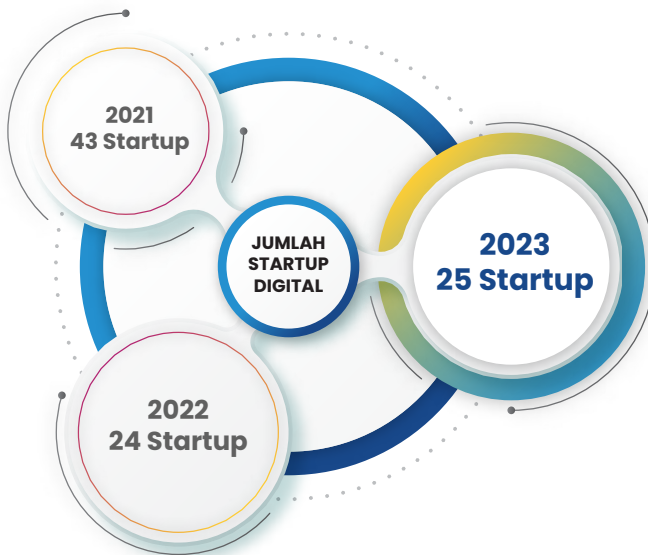
- Cexup
- Wypdex ERP
- Genius Ticketing
- MedFlux
- E-HAS

HUB.ID ACCELERATOR

HUB.ID Accelerator

adalah program akselerator startup yang diselenggarakan oleh Kemkominfo. Program ini bertujuan untuk membantu startup Indonesia berkembang dan mencapai keberlanjutan bisnis dengan memanfaatkan jaringan luas HUB.ID yang terdiri dari perusahaan swasta, BUMN, dan mitra pemerintah.

Jumlah Startup Digital yang Mengikuti Program Tahun 2021-2023



Mitra Bisnis

2021

- 32 Pemerintah Daerah/Pusat
- 26 Swasta/BUMN



2022

- 42 Pemerintah Daerah/Pusat
- 39 Swasta/BUMN



2023

- 22 Telkom Group
- 22 BUMN
- 13 Swasta
- 3 Universitas
- 5 Pemerintah Daerah/Pusat



Jumlah Pertemuan Bisnis

2021

143 Pertemuan



2022

179 Pertemuan



2023

501 Pertemuan



HUB.ID SUMMIT

HUB.ID Summit

adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Kemkominfo yang menjadi penghubung antara startup digital di Indonesia dengan modal ventura global, perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah dan mitra bisnis lainnya. Program ini berfokus untuk startup digital yang mencari pendanaan di level seed sampai series A.

Jumlah Startup Digital yang Mengikuti Program Tahun 2022-2023



Jumlah Venture Capital yang Mengikuti Event



Mitra Bisnis



Jumlah Pertemuan Bisnis





BAB 6

Industri Gim



LAYANAN KLASIFIKASI GIM (IGRS)

PERIODE DATA AGUSTUS 2023

Indonesia Game Rating System

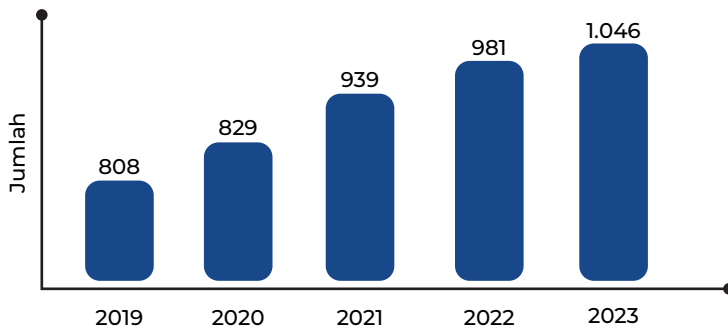
Merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

IGRS adalah suatu sistem yang menjadi panduan untuk mengategorikan konten gim kepada kelompok usia tertentu yang pertama kali diluncurkan dalam acara BEKRAF Game Prime 2016. IGRS membantu pengembang dan distributor Permainan Interaktif Elektronik dalam memasarkan produk sesuai dengan nilai-nilai dan norma di Indonesia.

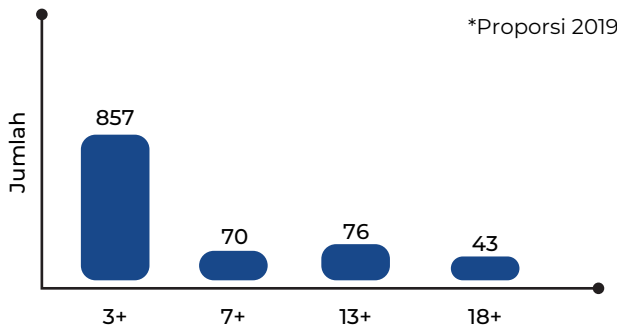
Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Usia



Jumlah GIM yang Terklasifikasi



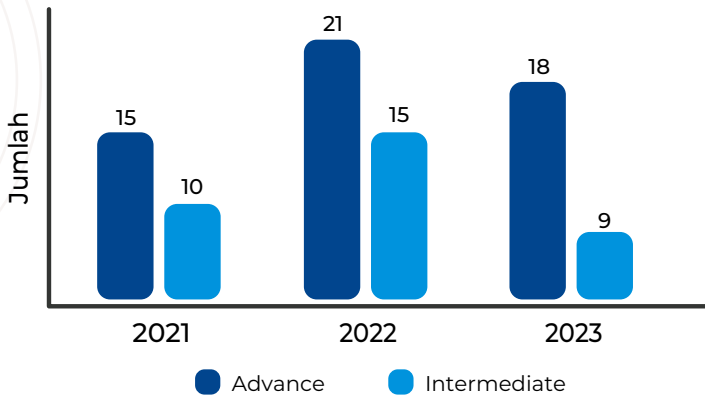
Gim yang Sudah Terating Berdasarkan Klasifikasi Usia



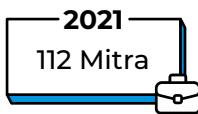
Indonesia Game Developer eXchange (IGDX)

Merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kemkominfo yang bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI), sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas teknis dan kapabilitas bisnis pengembang gim Indonesia.

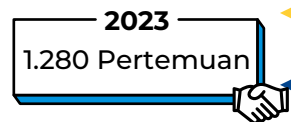
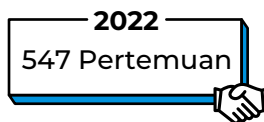
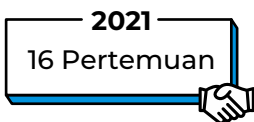
Perbandingan Peserta Game Developer Tahun 2021 - 2023



Mitra Bisnis yang Mengikuti Pertemuan Bisnis



Jumlah Pertemuan Bisnis yang Terjadi





BAB 7

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

LAYANAN PSE PUBLIK

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Dasar Hukum Pendaftaran PSE Publik



1 UU Nomor 11 Tahun 2008 perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

3 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara

5 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi Bidang Informasi dan Komunikasi

LAYANAN PSE PUBLIK

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Alur Permohonan Layanan PSE Publik



Pastikan kamu sudah terdaftar sebagai pejabat pendaftar atau sub-pejabat. Kemudian *log in* akun pada PSE Publik, pilih menu pada PSE Publik, pilih menu **Sistem Elektronik**.



Tekan tanda + di bagian kanan, lalu isi informasi sesuai dengan formulirnya. Jika sudah, klik *Save*.



Tunggu verifikasi oleh Admin. Jika Sudah, akan terlihat pada daftar **Sistem Elektronik**.

Lalu pengguna bisa melengkapi isian formulir pendaftaran **Sistem Elektronik** dengan klik tombol biru.



Saat *progress* telah mencapai 100%, Pengguna dapat melakukan *submit* dengan menekan tombol berwarna hijau untuk mengunci data.

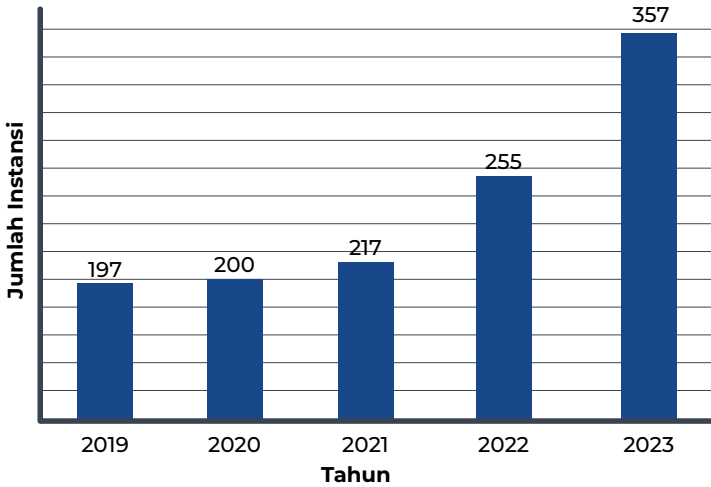


Selesai! **Sistem Elektronik** yang telah diverifikasi akan mendapatkan Tanda Daftar Sistem Elektronik berupa logo pada kiri atas.

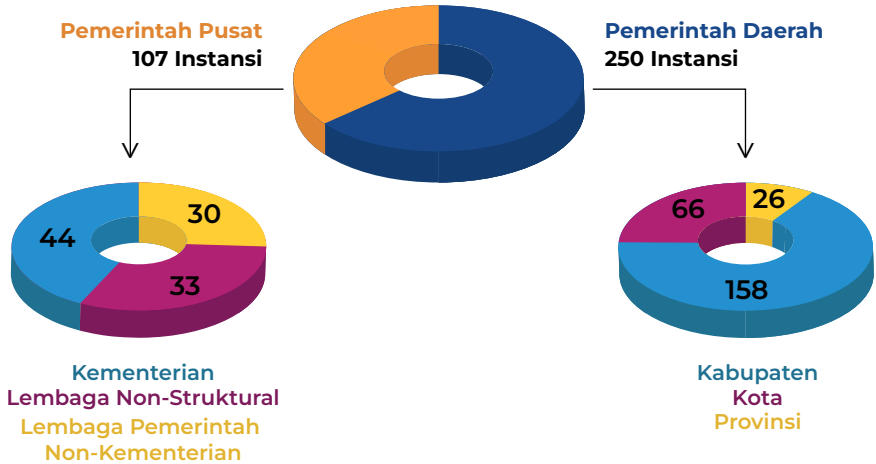
LAYANAN PSE PUBLIK

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Jumlah PSE Publik Terdaftar 2019 - 2023

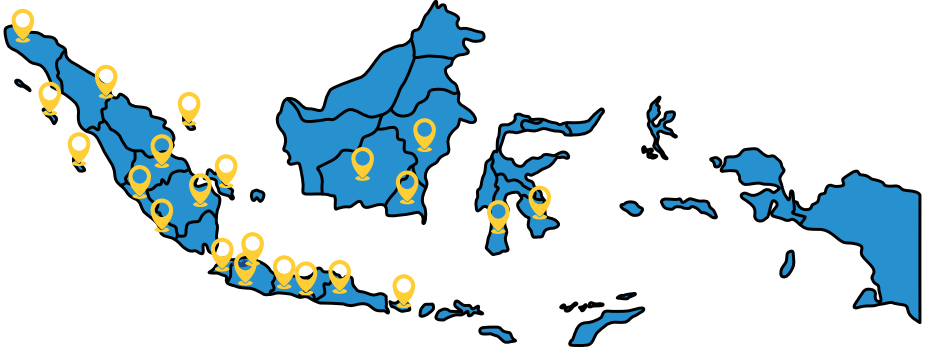


Instansi yang Sudah Mendaftar PSE 2019-2023



LAYANAN PSE PUBLIK

PERIODE DATA OKTOBER 2023



Daerah Instansi	Jumlah
Aceh	3
Bali	2
Banten	9
Bengkulu	1
D.I Yogyakarta	4
DKI Jakarta	14
Jambi	1
Jawa Barat	3
Jawa Tengah	24
Jawa Timur	23
Kalimantan Selatan	1
Kalimantan Tengah	1
Kalimantan Timur	1
Kepulauan Bangka Belitung	1
Kepulauan Riau	1
Medan	1
Riau	1
Sulawesi Selatan	2
Sulawesi Tenggara	2
Sumatera Barat	3
Sumatera Selatan	1
Sumatera Utara	3

LAYANAN PSE PRIVAT

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang merupakan peraturan pelaksana dari **Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019** tentang **Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**.

Dasar Hukum Pendaftaran PSE Privat

PerMen Kominfo No. 3 Tahun 2021

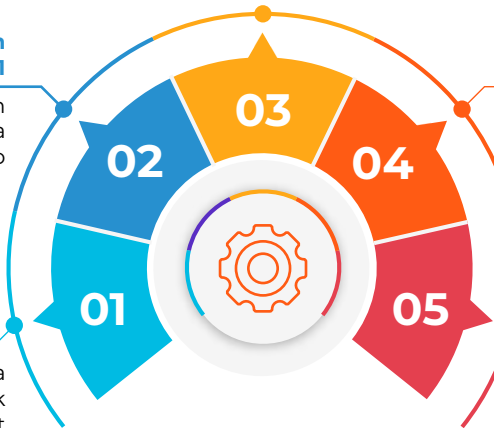
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PerMen No. 5 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PerMen Kominfo No. 5 Tahun 2020

Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat



PerMen Kominfo No. 10 Tahun 2021

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3 Tahun 2022

Tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

LAYANAN PSE PRIVAT

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Alur Pendaftaran PSE Privat Domestik

01

Prasyarat Pendaftaran PSE Lingkup Privat :

1. Menyelesaikan proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Menyelesaikan proses pengajuan izin Berusaha terkait.
3. Memiliki kode KBLI yang merepresentasikan operasional Sistem Elektronik Anda.



02

Pendaftaran PSE melalui OSS

Pengajuan permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat dilakukan melalui OSS pada menu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), kecuali yang ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

04

Proses Pendaftaran Selesai

Sistem elektronik telah tercatat dalam list PSE terdaftar di Kemkominfo (<https://pse.kominfo.go.id>).

03

Cetak TD PSE

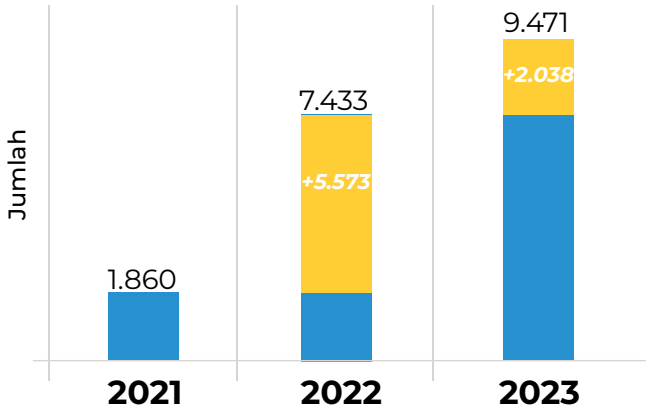
Anda dapat mengunduh dan/ atau mencetak tanda daftar PSE yang telah ditandatangani secara elektronik dengan melakukan login kembali ke laman oss.go.id setelah melakukan konfirmasi permohonan dengan mengklik tautan yang tersedia pada email konfirmasi.



LAYANAN PSE PRIVAT

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Jumlah PSE Privat Terdaftar 2021 - 2023



TOTAL PSE PRIVAT 9.740

Jumlah PSE Terdaftar Berdasarkan Kategori 8 Sektor Layanan PSE Privat



Sektor Teknologi
Informasi dan Komunikasi

6.921



Sektor Perdagangan

4.604



Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral

65



Sektor Keuangan

4.113



Sektor Kesehatan

1.098



Sektor Transportasi

503



Sektor Pangan

169



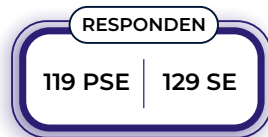
Sektor Pertahanan dan
Keamanan

60

LAYANAN PSE PRIVAT

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan PSE Terdaftar pada Prinsip PDP Tahun 2023



TARGET
CAPAIAN
KINERJA
-2023-



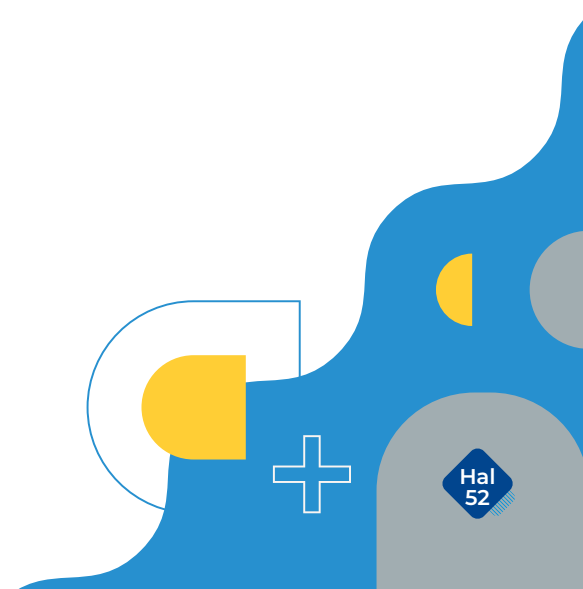
CAPAIAN
89/119
PSE mendapat nilai minimal 70%





BAB 8

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)



PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Regulasi Tentang PSrE

PP No. 71 Th. 2019
Tentang PSrE Pasal 51

Permen Kominfo No.11
Th. 2018 Tentang PSE

UU No. 11 Tahun 2008
Tentang ITE


Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan PSrE Indonesia.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang diterbitkan PSrE Indonesia.

Layanan PSrE

- Tanda Tangan Elektronik 
- Penanda Waktu Elektronik 
- Autentikasi Situs Website 
- Segel Elektronik 
- Layanan Pengiriman Elektronik 
- Preservasi Tanda Tangan Elektronik 

PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK

9 PSrE Berinduk di Indonesia yang Telah Terdaftar

Instansi



Balai Sertifikasi Elektronik

Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara

Non Instansi



PT Privy Identitas Digital



PT Djelas Tandatangan Bersama



PT Solusi Net Internusa



PT Tilaka Pusat Teknologi



Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia



PT Digital Tandatangan Asli



VIDA
Verified Identity for All

PT Indonesia Digital Identity (VIDA)



PT Solusi Identitas Global Net



BAB 9

Literasi Digital Indonesia

LITERASI DIGITAL INDONESIA

PERIODE DATA OKTOBER 2023

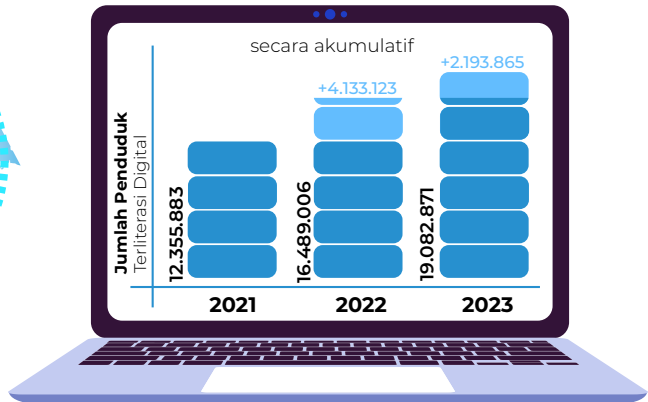
4 Pilar Literasi Digital



Pencapaian Literasi Digital Keseluruhan



Pencapaian Literasi Digital 2021-2023

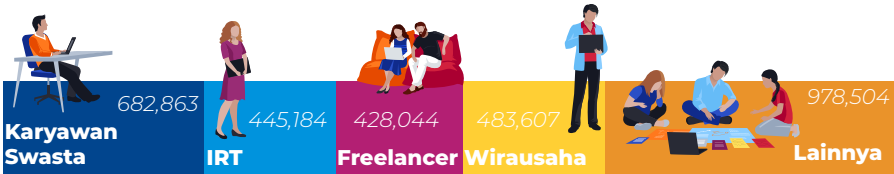


LITERASI DIGITAL

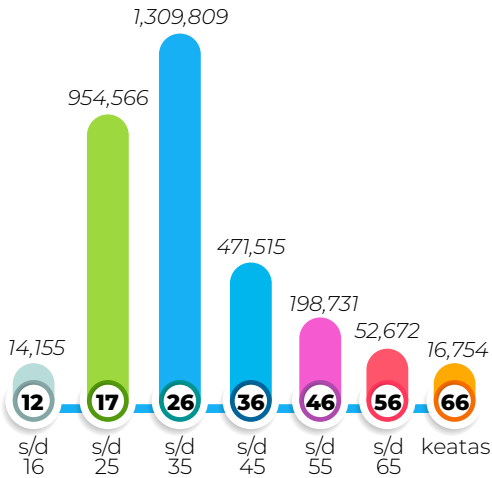
Sektor Masyarakat Tahun 2023

PERIODE DATA OKTOBER 2023

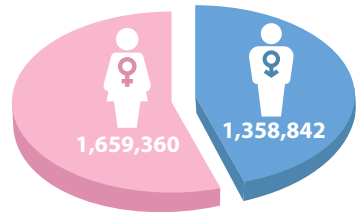
Demografi Peserta Tahun 2023



Persebaran Kegiatan dan Jumlah Peserta Tahun 2023

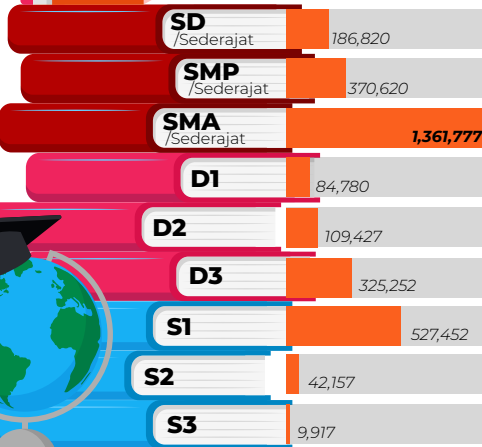


Berdasarkan Usia



Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Pendidikan



LITERASI DIGITAL

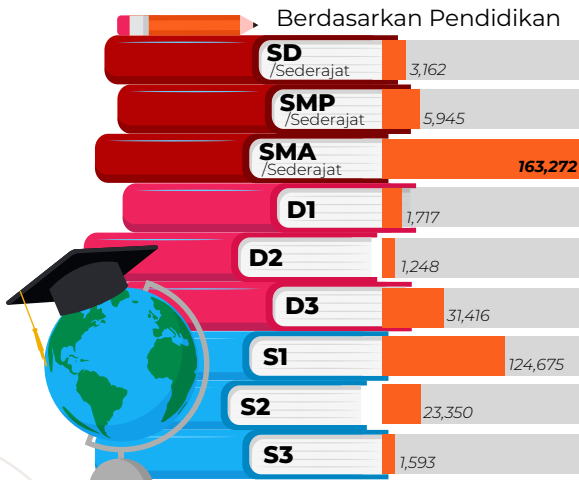
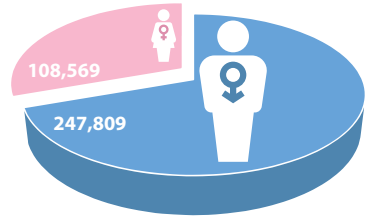
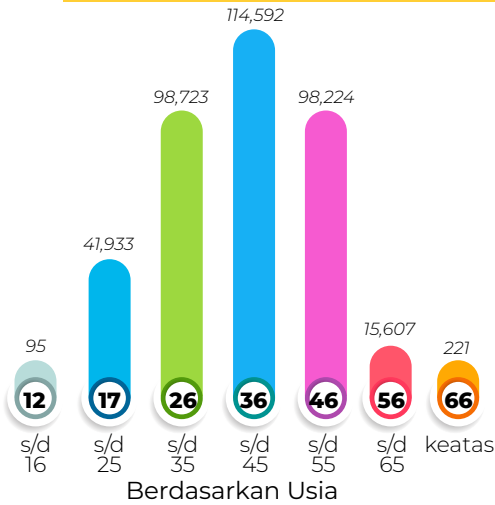
Sektor Pemerintah Tahun 2023

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Demografi Peserta Tahun 2023



Persebaran Kegiatan dan Jumlah Peserta Tahun 2023



LITERASI DIGITAL

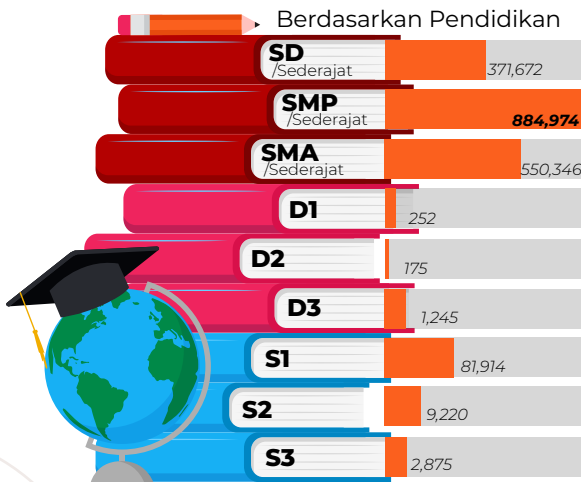
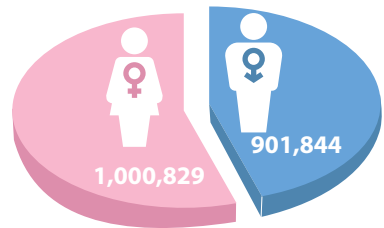
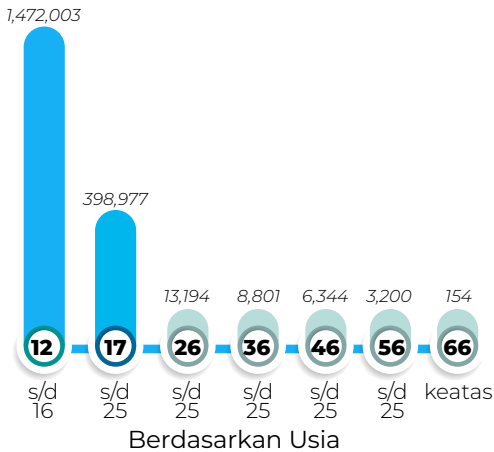
Sektor Pendidikan Tahun 2023

PERIODE DATA OKTOBER 2023

Demografi Peserta Tahun 2023



Persebaran Kegiatan dan Jumlah Peserta Tahun 2023



BAB 10

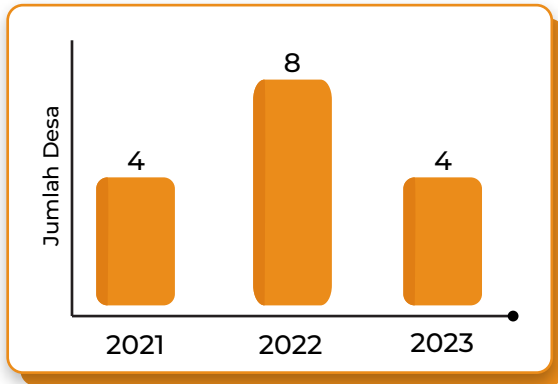
Pendampingan
Peningkatan TIK oleh
Ditjen Aptika Kepada
Pelaku Usaha di Indonesia



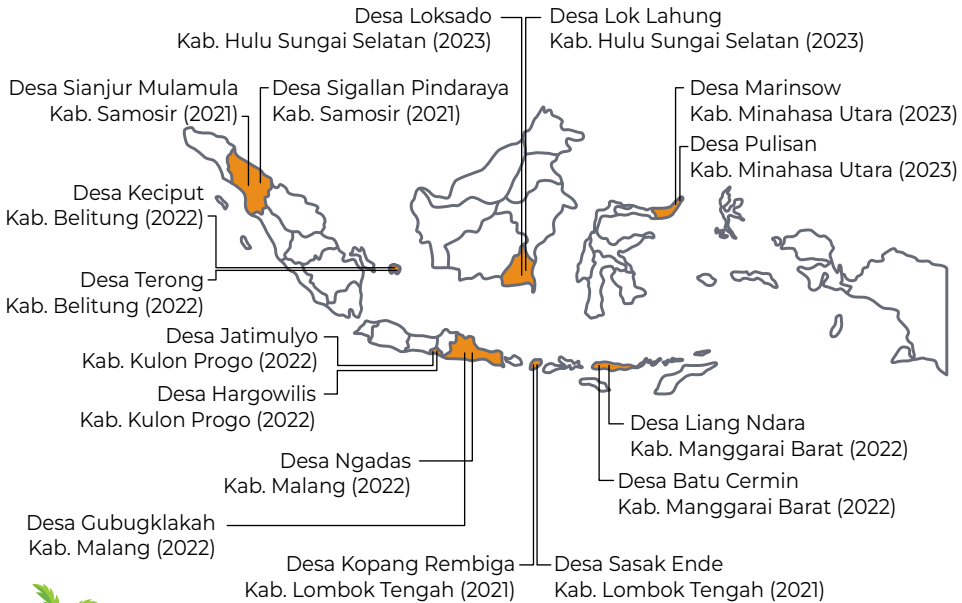
ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR PARIWISATA



Jumlah Desa Wisata yang Diadopsi Fasilitas Teknologi Digital

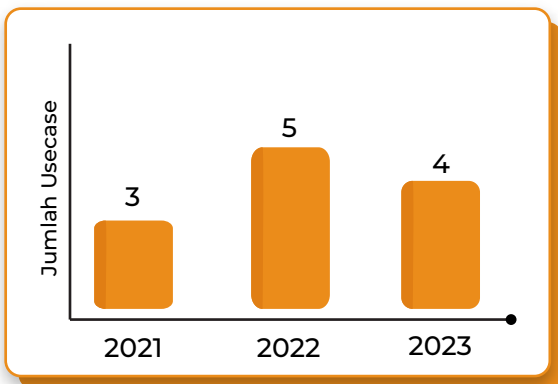


Peta Kawasan Prioritas dan Sebaran Desa yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital



ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR PARIWISATA

Jumlah Usecase Teknologi yang Digunakan



Usecase Teknologi yang Digunakan

Tahun 2021

- Sub Industri Desa Wisata pada rantai nilai Infrastruktur Digital (website dan virtual tour)
- Sub Industri Desa Wisata pada rantai nilai SDM Digital (pemanfaatan Website/Media Sosial)

- Sub Industri Desa Wisata pada rantai nilai Promosi Digital



01

Tahun 2022

- Sub Industri Desa Wisata pada rantai nilai Sistem Pembayaran Digital
- Sub Industri Eko wisata pada rantai nilai Infrastruktur Digital (website dan virtual tour)
- Sub Industri Eco Wisata pada rantai nilai SDM Digital (pemanfaatan Website/Media Sosial)

- Sub Industri Ekowisata pada rantai nilai Promosi Digital
- Sub Industri Ekowisata pada rantai nilai Sistem Pembayaran Digital



02

Tahun 2023

- Teknologi Media Sosial dalam rantai nilai Akomodasi
- Teknologi Pembuatan Konten/ Promosi dalam rantai nilai Akomodasi

- Teknologi Penggunaan Situs Web dalam rantai nilai Akomodasi
- Teknologi Media Sosial dalam rantai nilai Akomodasi

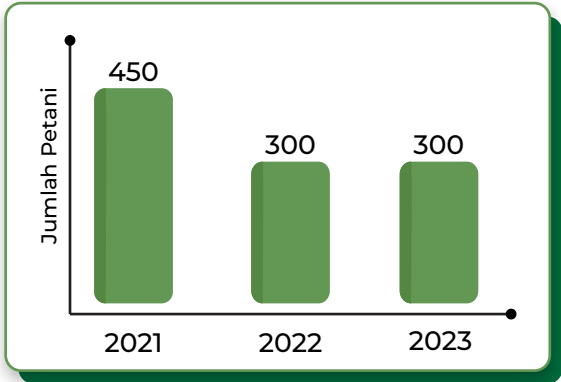


03

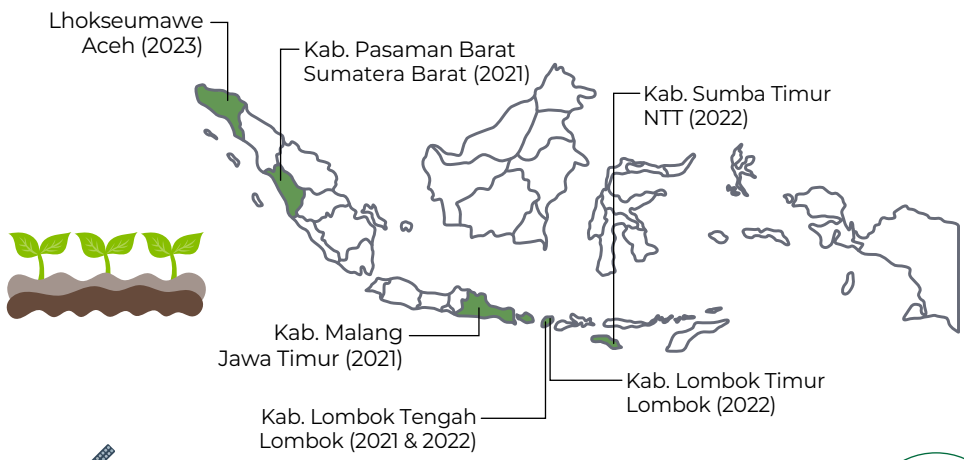


ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR PERTANIAN

Jumlah Petani yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital

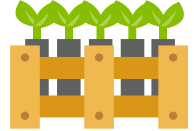
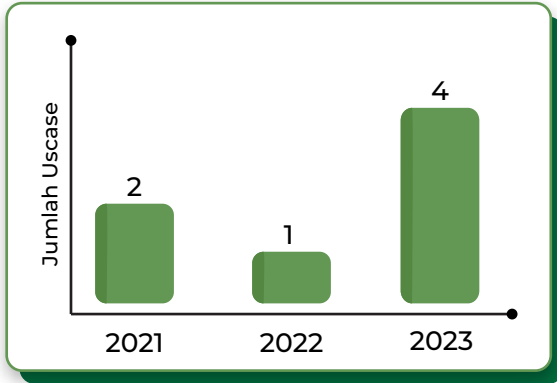
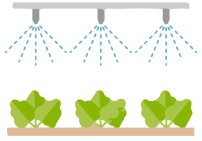


Peta Kawasan Prioritas yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital



ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR PERTANIAN

Jumlah Usecase Teknologi yang Digunakan



Usecase Teknologi yang Digunakan

Tahun 2021

01

- Teknologi Digital untuk mendapatkan rekomendasi GAP secara real time untuk tanaman pangan.
- Teknologi digital untuk mendapatkan rekomendasi GAP secara real time untuk tanaman Hortikultura.



Tahun 2022

02

- Teknologi Pengatur Pengairan (Drip Irrigation, Sensor Debit Air) untuk tanaman hortikultura.



Tahun 2023

03

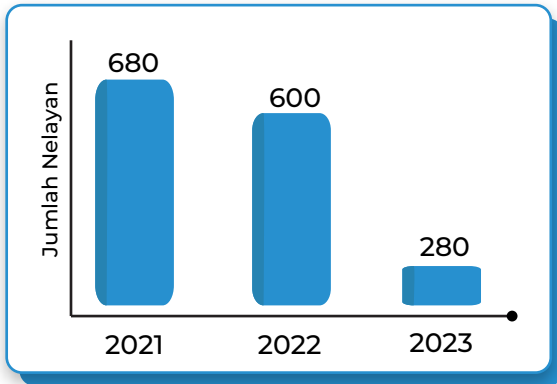
- Teknologi Penyuluhan Pertanian Online untuk tanaman pangan.
- Platform E-commerce Pertanian untuk tanaman pangan.
- Teknologi Penyuluhan Pertanian Online untuk tanaman hortikultura.
- Platform E-commerce Pertanian untuk tanaman hortikultura.



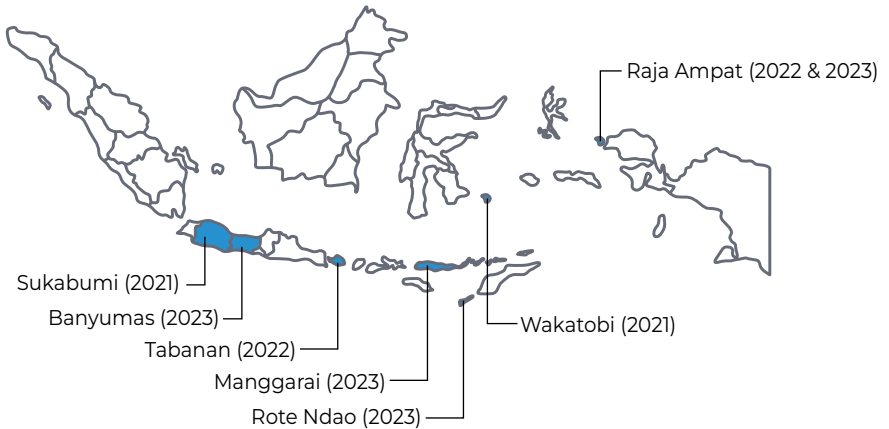


ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR MARITIM

Jumlah Nelayan yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital

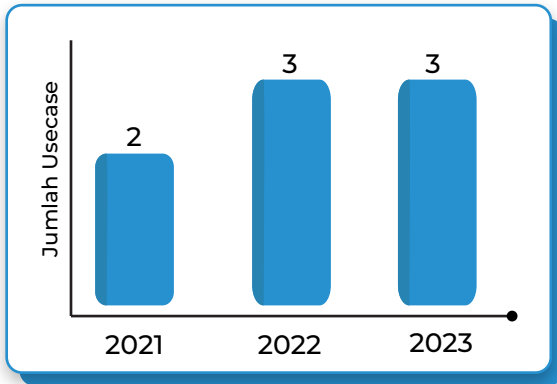


Peta Kawasan Prioritas yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital



ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR MARITIM

Jumlah Usecase Teknologi yang Digunakan



Usecase Teknologi yang Digunakan

Tahun 2021

01

- Marketplace digital perikanan tangkap
- IoT pengukur kualitas air



Tahun 2022

02

- Marketplace digital perikanan tangkap
- IoT pengukur kualitas air
- Peta prakiraan daerah tangkapan dan informasi perkiraan BBM

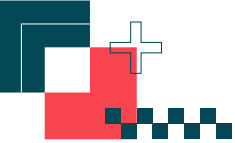


Tahun 2023

03

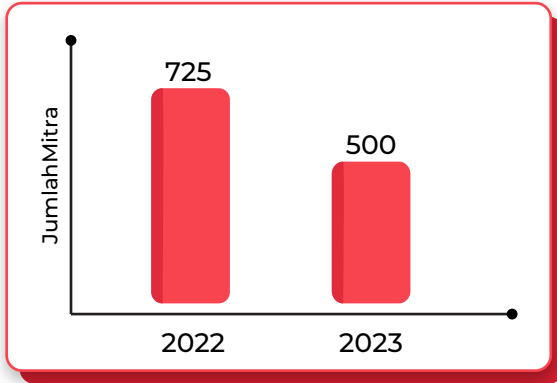
- Microbubble kualitas air
- Automatic feeder
- Peta prakiraan daerah tangkapan dan informasi perkiraan BBM



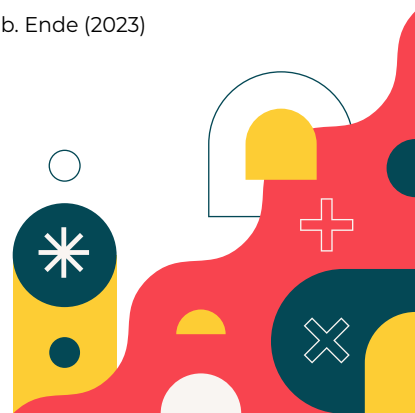
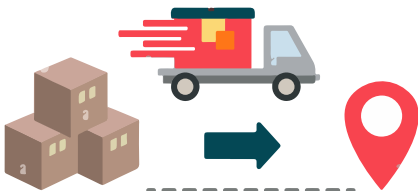
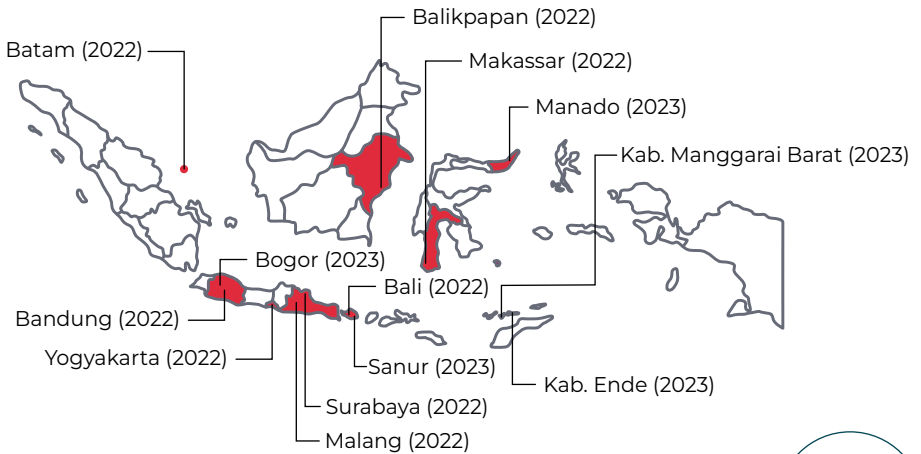


ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR LOGISTIK

Jumlah Mitra yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital

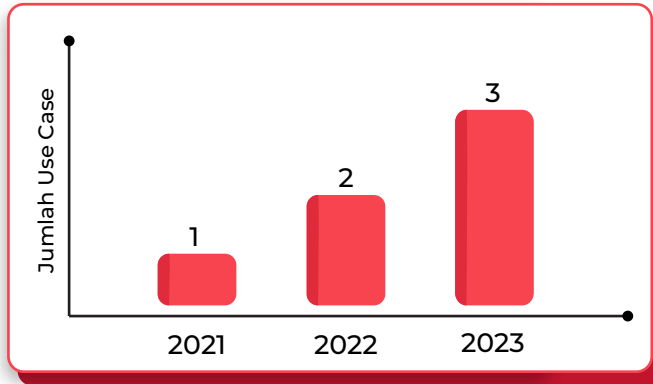


Peta Kawasan Prioritas yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital



ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR LOGISTIK

Jumlah Use Case Teknologi yang Digunakan



Use Case Teknologi yang Digunakan

Tahun 2021

01

- Terselenggaranya Kajian Inisiatif Teknologi Digital Logistik.

Tahun 2022

02

- Teknologi Digital Fulfillment (warehouse sharing) pada rantai nilai Storage.
- Teknologi Digital Trucking (last mile delivery) pada rantai nilai Transportation.

Tahun 2023

03

- Teknologi Vehicle Mounted dengan IoT GPS Tracker dan Vehicle Smart Management System pada rantai nilai transportation.
- Teknologi Vehicle Mounted dengan Transportation Management System pada rantai nilai transportation.
- Teknologi Vehicle Mounted untuk Cold Chain System pada rantai nilai storage dan transportation.

ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR UMKM

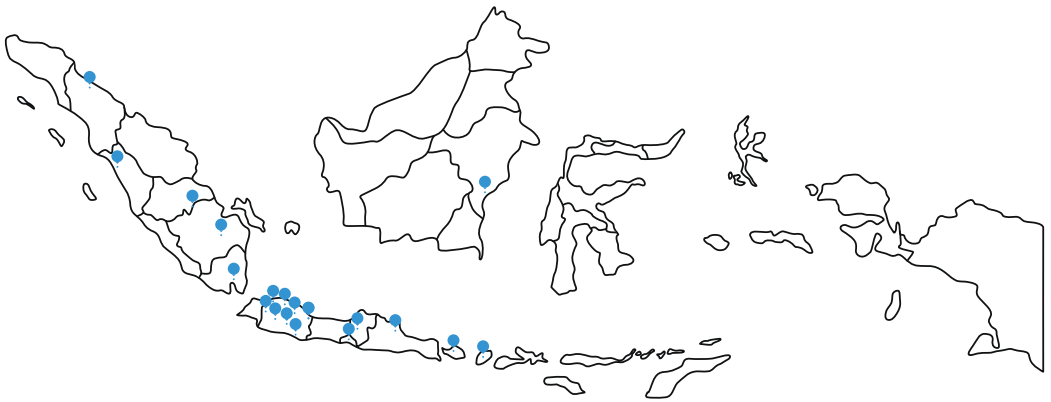
UMKM Go - Online

2019

Kemkominfo melalui program UMKM Go Online berupaya membantu masyarakat kecil terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk ikut berjualan online dengan memanfaatkan marketplace yang tersedia seperti :



Kegiatan dan Capaian Tahun 2019



ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR UMKM

Kajian Pemetaan UMKM dan Kebutuhan Teknologi Digital

2020

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Kemkominfo pada tahun 2020 adalah penyusunan Kajian Pemetaan UMKM dan Kebutuhan Teknologi Digital.

Rekomendasi Kebijakan

Dari Kegiatan Kajian Pemetaan UMKM dan Kebutuhan Teknologi Digital menghasilkan Rekomendasi Kebijakan diantaranya:

Pendampingan dan Pelatihan:

- Pelatihan non-teknologi : manajemen usaha, pengelolaan SDM, keterampilan
- Pelatihan literasi teknologi digital yang didukung dengan dokumen panduan adopsi teknologi, serta pelatihan penunjang adopsi teknologi seperti pemasaran online, penyediaan platform penjualan



Bantuan Modal Usaha

berupa dana segar dan alat-alat (mesin penunjang usaha dan perangkat digital)



Pembangunan Infrastruktur

berupa jaringan internet, dikarenakan beberapa daerah memiliki kondisi jaringan internet yang buruk / tidak adanya internet sama sekali



Kajian Pemetaan UMKM dan Kebutuhan Teknologi Digital menjadi dasar dari milestone journey program UMKM pada tahun selanjutnya.



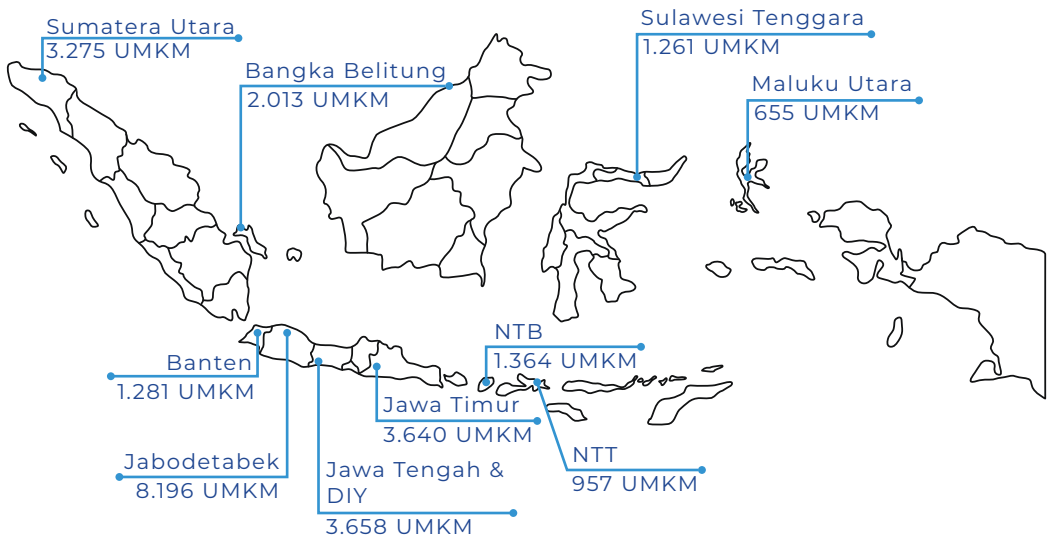
ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR UMKM

UMKM Active Selling

2021

Bertujuan untuk mendorong UMKM aktif berjualan dan active selling dalam rangka mempersiapkan UMKM naik kelas dari sisi adopsi teknologi. Active selling dibagi atas tiga kriteria, yaitu jumlah UMKM yang secara aktif melakukan upload foto dan deskripsi produk, jumlah UMKM yang aktif berinteraksi dengan pelanggan, dan jumlah UMKM aktif yang melakukan transaksi penjualan.

Kegiatan dan Capaian Tahun 2021



ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR UMKM

2022

UMKM Go Online 4.0 - Scalling Up

kegiatan Adopsi Teknologi Digital UMKM akan berfokus untuk implementasi teknologi 4.0 bagi para pelaku UMKM. Adapun teknologi 4.0 yang akan diuji coba (Proof of Concept) yaitu teknologi Point of Sales/Enterprise Resource Planning System, Cloud Computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Augmented Reality/Virtual Reality, Internet of Things, dan lain-lain.

Kegiatan dan Capaian Tahun 2022

Jumlah Peserta Berdasarkan Level Adopsi

Pre-Assesment

8.103

UMKM BEGINNER

16.949

UMKM OBSERVER

5.255

UMKM ADOPTER

433

UMKM LEADER

Post-Assesment

0

UMKM BEGINNER

6.263

UMKM OBSERVER

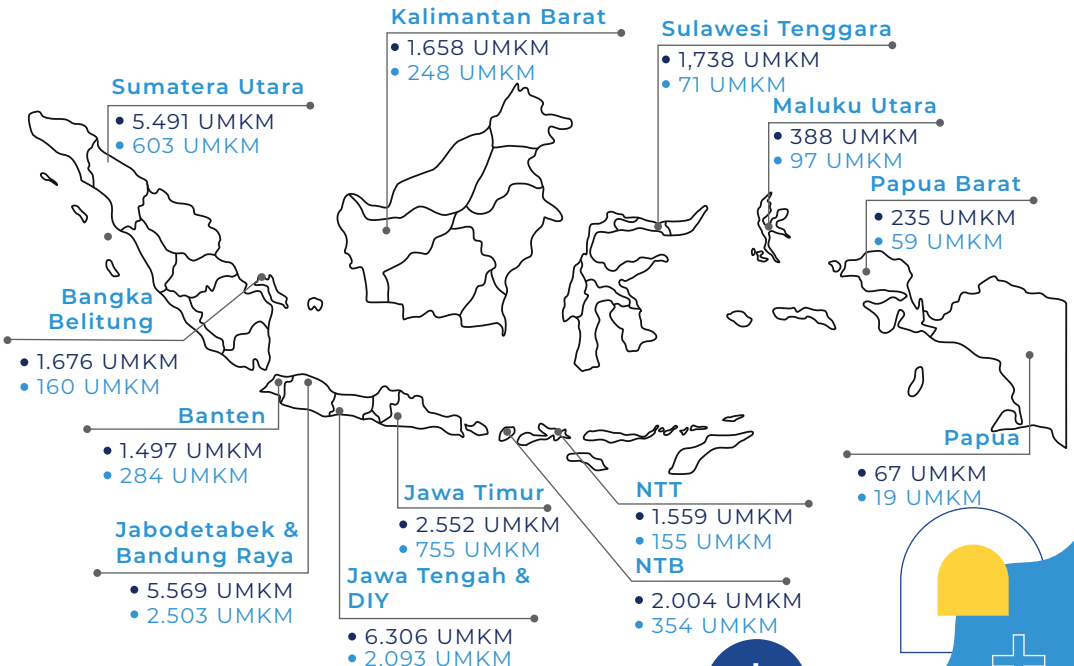
1.112

UMKM ADOPTER

26

UMKM LEADER

Sebaran Jumlah Peserta Berdasarkan Wilayah



● Pre-Assesment ● Post-Assesment

Hal
72



ADOPTSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR UMKM

UMKM Level Up

2023

Program Kemkominfo yang merupakan bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendorong para pelaku UMKM naik kelas (Level Up) dari sisi adopsi teknologi digital.



Memperluas akses informasi dan pemasaran



Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis



Meningkatkan jumlah pendapatan dan transaksi penjualan



Meningkatkan daya saing dan inovasi

Kegiatan dan Capaian UMKM Level Up Tahun 2023

Jumlah Peserta Berdasarkan Level Adopsi

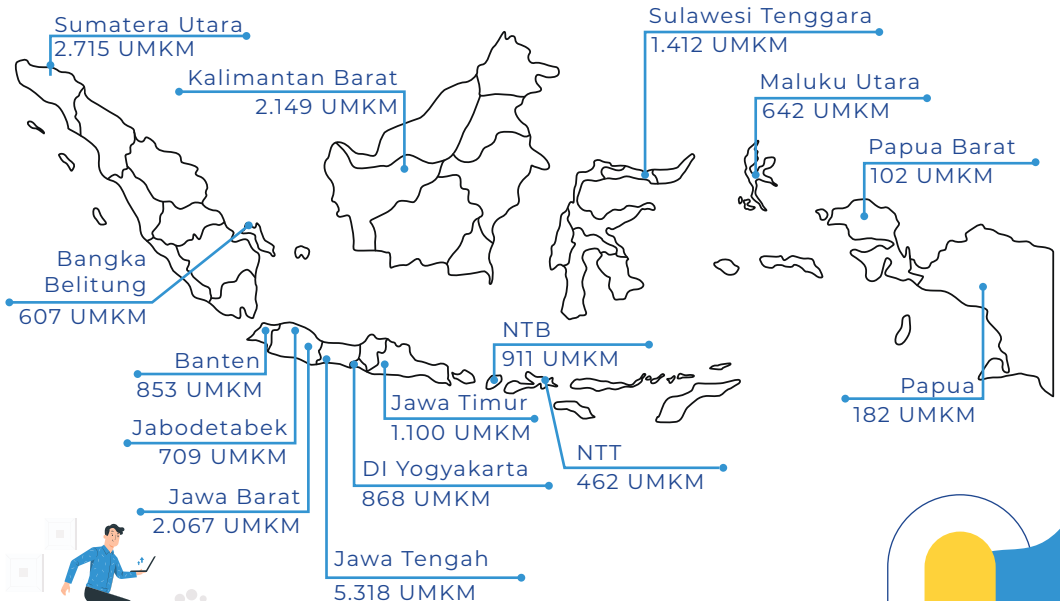
16.605
UMKM BEGINNER

3.283
UMKM OBSERVER

154
UMKM ADOPTER

0
UMKM LEADER

Sebaran Jumlah Peserta Berdasarkan Wilayah

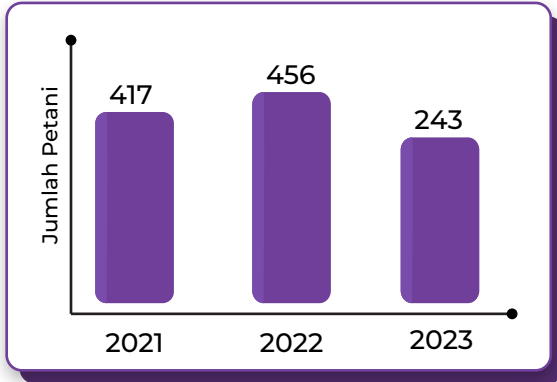


BAB 11

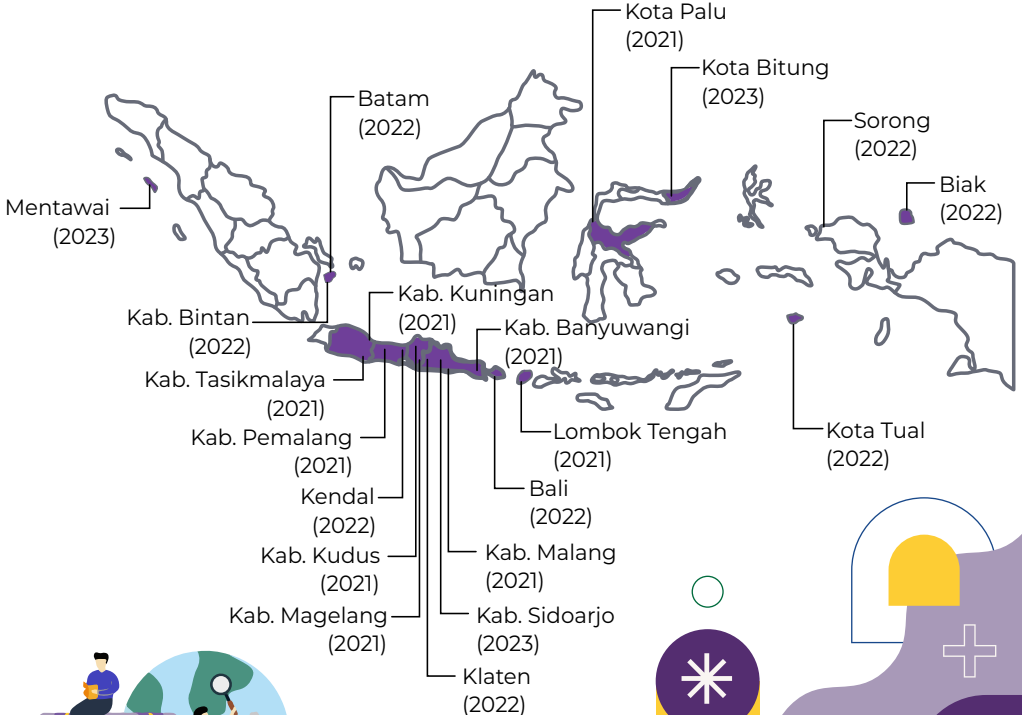
Pendampingan
Peningkatan TIK oleh
Ditjen Aptika Untuk Wilayah
di Indonesia

ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR PENDIDIKAN

Jumlah Sekolah yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital

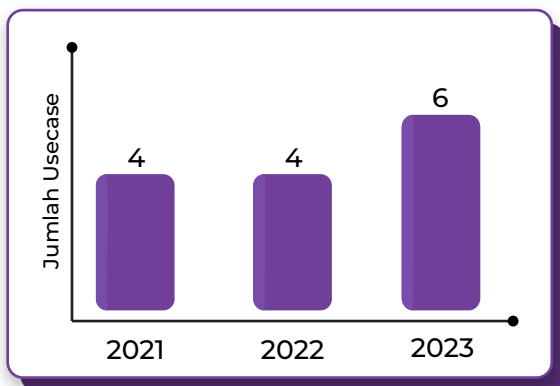


Peta Kawasan Prioritas yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital



ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR PENDIDIKAN

Jumlah Usecase Teknologi yang Digunakan



Use Case Teknologi yang Digunakan

Tahun 2021

- Learning Management System, Video Based Learning, Gamification, Teknologi Imersif Augmented Reality



01

Tahun 2022

- Teknologi Imersif Augmented Reality, Learning Management System, Big Data, Website Sekolah dengan Domain SCH.ID



02

Tahun 2023

- Platform Management Karier Siswa, Video Based Learning, Gamification, Learning Management System, Ujian Online, Lab Virtual Berbasis Virtual Reality

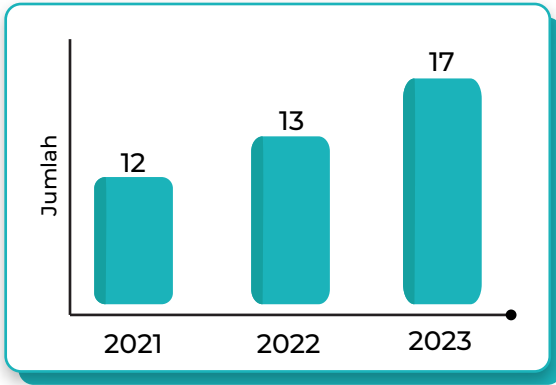


03

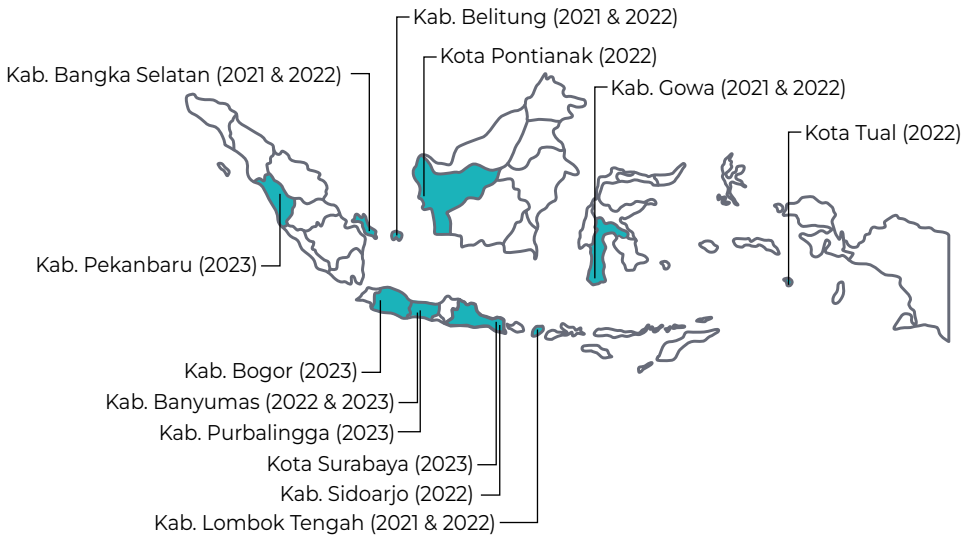


ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR KESEHATAN

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital

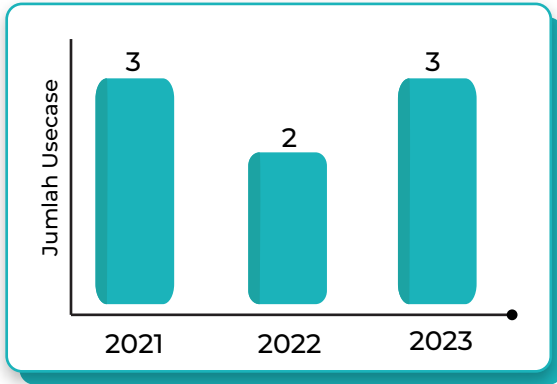


Peta Kawasan Prioritas yang Difasilitasi Adopsi Teknologi Digital



ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL SEKTOR KESEHATAN

Jumlah Usecase Teknologi yang Digunakan



Usecase Teknologi yang Digunakan

Tahun 2021

01

- Teknologi Telehealth pada rantai nilai Consultation & Diagnostic.
- Teknologi Big Data pada Consultation & Diagnostic
- Teknologi Sistem Informasi pada rantai nilai Registration & Appointment, Consultation & Diagnostic dan Treatment



Tahun 2022

02

- Teknologi Telehealth pada rantai nilai Registration & Appointment, Treatment dan Payment
- Teknologi Sistem Informasi pada rantai nilai Delivery dan Payment



Tahun 2023

03

- Teknologi On Demand Healthcare pada rantai nilai Registration & Appointment
- Teknologi Big Data pada rantai nilai Treatment, Delivery, Payment
- Teknologi Big Data pada rantai nilai Registration & Appointment

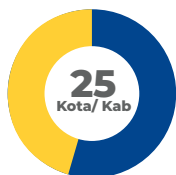


Gerakan Menuju Kota Cerdas Indonesia

Gerakan Menuju Kota Cerdas

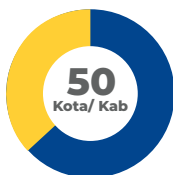
merupakan sebuah konsep pengembangan kabupaten/kota berdasarkan prinsip pemanfaatan TIK untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien.

Kabupaten/Kota yang Telah Menyusun Masterplan Smart City



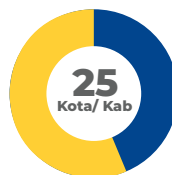
2017

- 12 Kota
- 13 Kabupaten



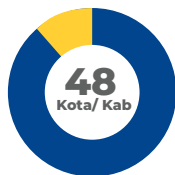
2018

- 19 Kota
- 31 Kabupaten



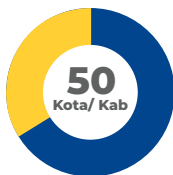
2019

- 13 Kota
- 12 Kabupaten



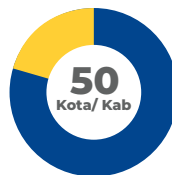
2021

- 5 Kota
- 43 Kabupaten



2022

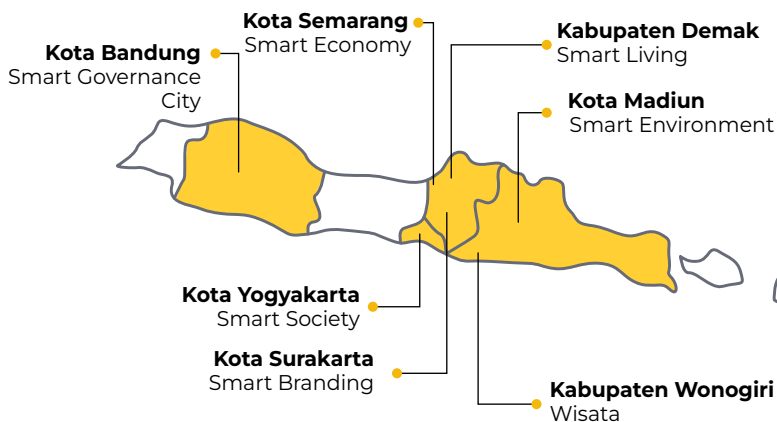
- 17 Kota
- 33 Kabupaten



2023

- 10 Kota
- 40 Kabupaten

Penerima Penghargaan Smart City Award 2022



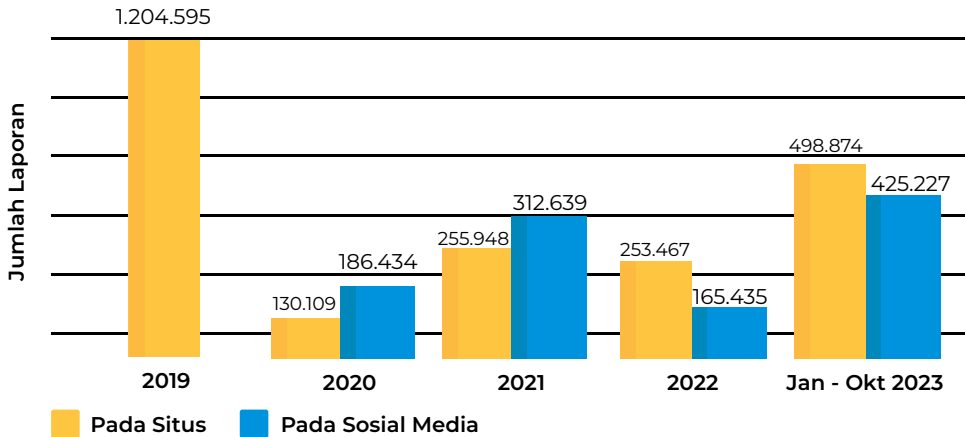
BAB 12

Layanan Aduan Masyarakat



PENGENDALIAN KONTEN

Laporan Aduan Konten Negatif



Statistik Penanganan Situs Internet Negatif

2019

Pada Situs :






- Pornografi : 1.025.263 Kasus
- Perjudian : 166.853 Kasus
- Penipuan : 8.689 Kasus
- Pelanggaran HKI : 1.946 Kasus
- Konten Negatif yang di rekomendasikan instansi Sektor : 1.556 Kasus

2020

Pada Situs :

- Pornografi : 46.266 Kasus
- Perjudian : 75.980 Kasus
- Penipuan : 3.481 Kasus
- Pelanggaran HKI : 2.903 Kasus
- Konten Negatif yang di rekomendasikan instansi Sektor : 1.366 Kasus

Pada Sosial Media :

- Twitter  : 178.091 Kasus
- Meta  : 6.463 Kasus
- File Sharing  : 1.276 Kasus
- Google  : 378 Kasus
- Telegram  : 225 Kasus



PENGENDALIAN KONTEN




Statistik Penanganan Situs Internet Negatif

2021

Pada Situs :

- Pornografi : 43.442 Kasus
- Perjudian : 204.807 Kasus
- Penipuan : 2.872 Kasus
- Pelanggaran HKI : 3.344 Kasus
- Konten Negatif yang di rekomendasikan instansi Sektor : 1.268 Kasus

Pada Sosial Media :






- Twitter  : 290.789 Kasus
- Meta  : 16.280 Kasus
- File Sharing  : 3.066 Kasus
- Telegram  : 751 Kasus
- Tiktok  : 225 Kasus

2022

Pada Situs :

- Pornografi : 49.889 Kasus
- Perjudian : 198.043 Kasus
- Penipuan : 1.913 Kasus
- Pelanggaran HKI : 2.258 Kasus
- Konten Negatif yang di rekomendasikan instansi Sektor : 1.348 Kasus

Pada Sosial Media :






- Twitter  : 111.359 Kasus
- Meta  : 37.316 Kasus
- File Sharing  : 13.433 Kasus
- Telegram  : 1.260 Kasus
- Google  : 1.049 Kasus

2023

Pada Situs :

- Pornografi : 48.510 Kasus
- Perjudian : 446.135 Kasus
- Penipuan : 376 Kasus
- Pelanggaran HKI : 2.725 Kasus
- Konten Negatif yang di rekomendasikan instansi Sektor : 1.032 Kasus

Pada Sosial Media :

- Twitter  : 160.128 Kasus
- Meta  : 205.352 Kasus
- File Sharing  : 44.809 Kasus
- Google  : 6.252 Kasus
- Telegram  : 2.283 Kasus



LAYANAN ADUAN MASYARAKAT

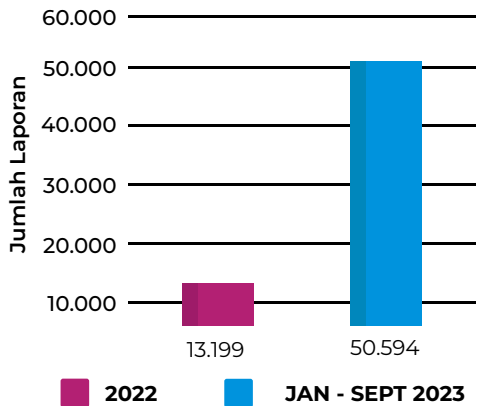
Informasi Terkait Aduan Konten Dapat Diakses Melalui Kanal Berikut:



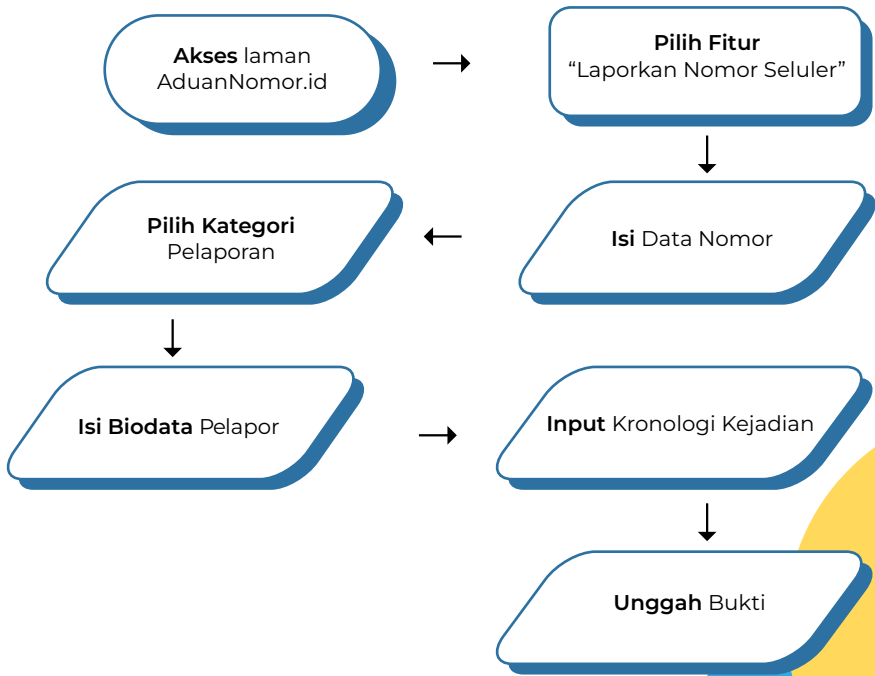


LAYANAN ADUAN MASYARAKAT

Layanan AduanNomor.id



Prosedur Pelaporan pada Layanan AduanNomor.id





LAYANAN ADUAN MASYARAKAT

Informasi Terkait AduanNomor.id Dapat Diakses Melalui Kanal Berikut:

@aduannomor.id

aduannomor.id



aduannomor.id

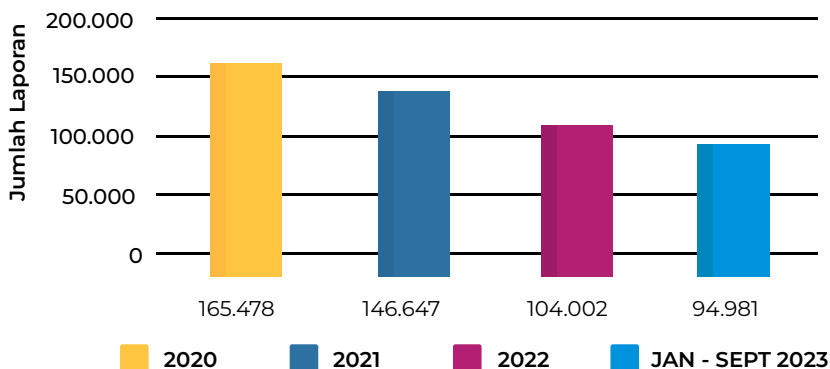
@aduannomor.id



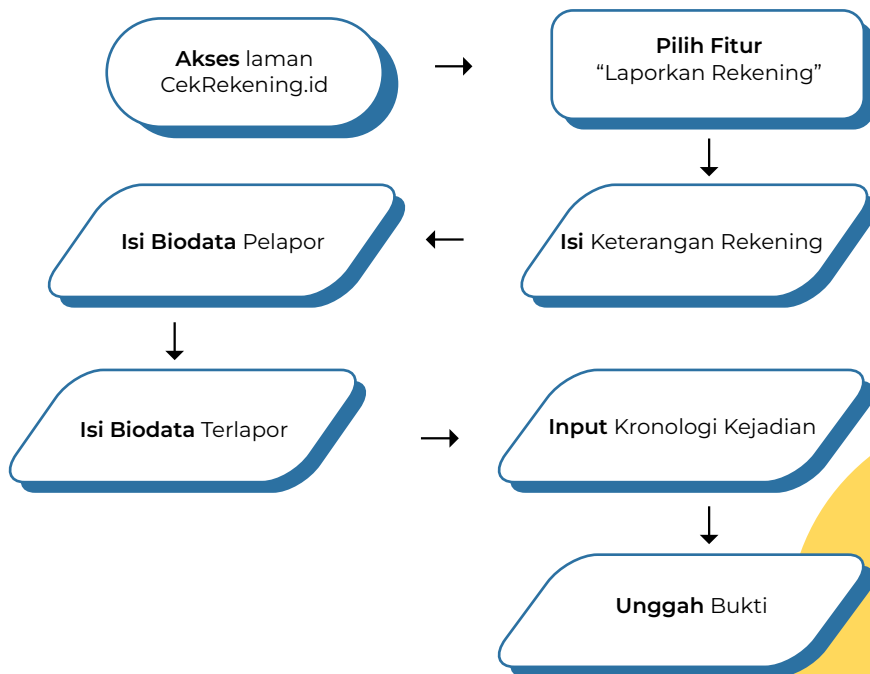
0811-8331-316

LAYANAN ADUAN MASYARAKAT

Layanan CekRekening.id



Prosedur Pelaporan pada Layanan CekRekening.id



LAYANAN ADUAN MASYARAKAT

Informasi Terkait CekRekening.id Dapat Diakses Melalui Kanal Berikut:





BAB 13

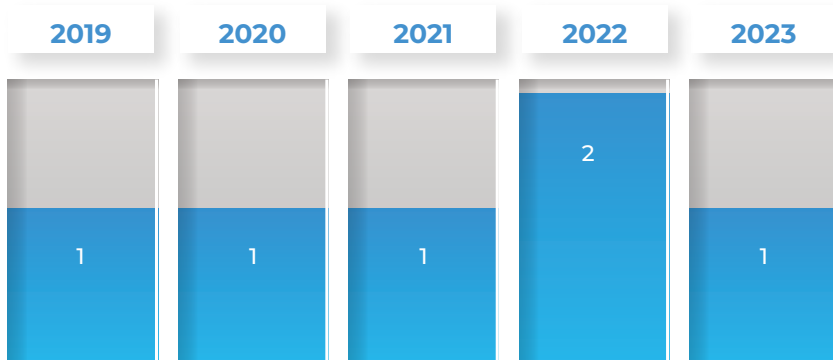
Penetapan Regulasi TIK





REGULASI YANG DITETAPKAN OLEH DITJEN APTIKA

Jumlah Peraturan Menteri yang Ditetapkan oleh Ditjen Aptika



Regulasi yang Ditetapkan

Permen Kominfo No.71 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Substansi :

- BAB II Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- BAB III Penyelenggara Agen Elektronik
- BAB IV Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
- BAB V Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
- BAB VI Lembaga Sertifikasi Keandalan
- BAB VII Pengelolaan Nama Domain
- BAB VIII Peran Pemerintah
- BAB IX Sanksi Administratif

2019

Permen Kominfo No.5 Tahun 2020

Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Substansi :

- BAB II Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- BAB III Tata Kelola dan Moderasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- BAB IV Permohonan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Dilarang
- BAB V Pemberian Akses terhadap Sistem Elektronik Untuk Kepentingan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana

2020



REGULASI YANG DITETAPKAN OLEH DITJEN APTIKA

Regulasi yang Ditetapkan

2021

Permen Kominfo No.10 Tahun 2021

Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Penambahan Pasal 47 tentang PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 bulan sejak pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku Efektif.

2022

Permen Kominfo No.11 Tahun 2022

Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Substansi :

- BAB II Tata Cara Pengakuan dan Pendaftaran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
- BAB III Tata Cara Memiliki Sertifikasi Elektronik
- BAB IV Layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
- BAB V Pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
- BAB VI Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
- BAB VII Sanksi Administratif

Permen Kominfo No.16 Tahun 2022

Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Substansi :

- BAB II Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- BAB III Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- BAB IV Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

2023

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2023

Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia

Substansi :

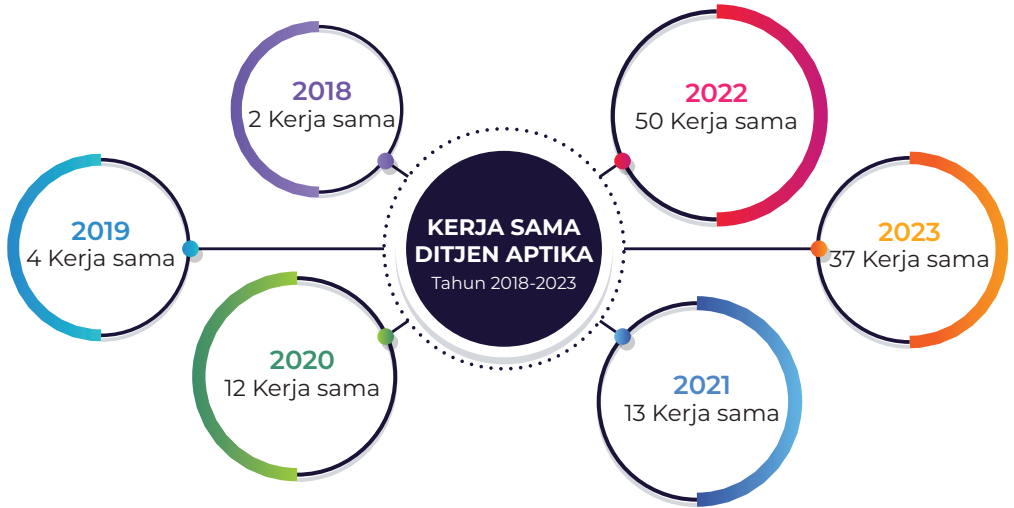
- BAB II Penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas Data



BAB 14





































Kerja Sama
Ditjen Aptika


KERJA SAMA DITJEN APTIKA



Mitra Kerja Sama

Pada Tahun 2023

 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya	 Badan Pengawas Pemilihan Umum	 Badan Siber dan Sandi Negara	 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya	 Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Barat	 50 Pemerintah Kabupaten/Kota
 Institut Pendidikan Indonesia Garut	 Institut Teknologi Garut	 STIS Ummul Ayman Pidie Jaya	 Politeknik Negeri Jember	 Universitas Jabal Ghafur	 Institut Seni Indonesia Yogyakarta
 Universitas Nahdlatul Ulama NTB	 Universitas Muhammadiyah Aceh	 Badan Siber dan Sandi Negara	 Institut Teknologi PLN	 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh	 Institut Seni Indonesia Surakarta
 Universitas Esa Unggul	 Universitas Gadjah Mada	 Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setjo	 PT. Iforte Solusi Infotek	 PT. BIT Nusantara	 PT. Indosat (Amandemen)
 PT. Smartfren Telecom	 PT. Indonesia Comnets Plus	 PT. XL Axiata	 FIF Finatra	 POS Indonesia	 Kemenkop UKM
 Badan Inteljen Strategis TNI	 BPJS Kesehatan	 Smart Telecom	 Komisi Aparatur Sipil Negara	 PT. Solusi Kreasi Digital	 Korika



BAB 15

Penghargaan Ditjen Aptika

PENGHARGAAN DITJEN APTIKA

PPNS DARI KABARESKRIM POLRI

Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika

Kategori Berperan aktif dalam penegakan hukum, koordinasi dan sinergitas dengan penyidik Polri tahun 2019.



PRESIDENTIAL AWARD 2020 DARI ICSB

Dit. Ekonomi Digital

Kategori Kontribusi dalam membangun ekonomi digital di wilayah timur Indonesia melalui program **UMKM Go Online** tahun 2020.



DIGITAL GOVERNMENT AWARD DALAM SPBE SUMMIT

Ditjen Aptika

Kategori Instansi Pusat dengan Pencapaian **INDEKS SPBE TERBAIK (Peringkat 11)** tahun 2023.



Peringkat Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Tahun 2021 di Lingkungan Kemkominfo

PRESTASI UNIT KEARSIPAN II

Nilai **92,24 (A - Sangat Memuaskan)**



PRESTASI UNIT PENGOLAH

- Dit. Ekonomi Digital nilai **96,80 (Sangat Memuaskan)**
- Ses. Aptika nilai **93,98 (Sangat Memuaskan)**
- Ses. Aptika nilai **93,98 (Sangat Memuaskan)**
- Dit. LAIP **93,02 (Sangat Memuaskan)**
- Dit. Takel **92,43 (Sangat Memuaskan)**



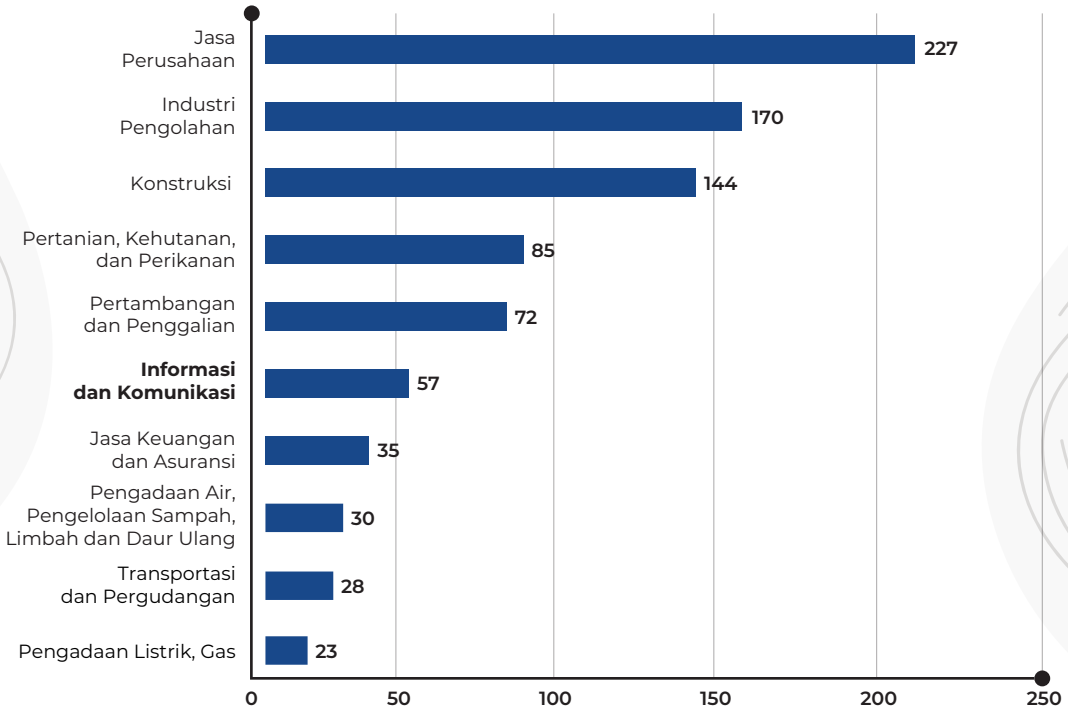


BAB 16

Perkembangan Bidang TIK Kedepan

PELUANG LAPANG KERJA DIBIDANG TIK DI INDONESIA

SKKNI yang Sudah Ditetapkan



Sumber : skkni.kemnaker.go.id, 2023

Informasi dan Komunikasi

SKKNI yang Berlaku

Keahlian Perlindungan Data Pribadi

Cloud Computing

Kriptografi

Keahlian Digital Forensi

Audit Keamanan Informasi

Uji Keamanan Siber

Keahlian Pengembangan
Video Game

Keahlian Artificial Intelligence
Subbidang Knowledge Based System

Security Operations Center

Internet Of Things

Keahlian Artificial Intelligence
(Data Science)

Data Management

Animasi

Telekomunikasi

Telekomunikasi Satelit

Programming and Software
Development, Network and Infrastructure,
Operation and System Tools

Audio Visual Engineering
Technician Support

Penerbitan Buku

Penyiaran Radio

Multimedia

Instalasi Fiber Optik

Penggelaran Jaringan Seluler
Subsistem Radio Akses

Administrasi Sistem

Software Development -
Software Quality Assurance

Sumber : skkni.kemnaker.go.id, 2023

Informasi dan Komunikasi

SKKNI yang Berlaku

Software Development - Software Requirement Analysis and Design

Penyiaran Radio

Optimalisasi Jaringan Seluler

Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Seluler

Jaringan Komputer

Computer Technical Support

Software Development - Pemrograman

Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan

Mobile Computing

Penulis Naskah Program Siaran Televisi

Penyutradaraan Televisi

Enterprise Architecture Design

Keamanan Informasi

Pengelolaan Pusat Data

Produser Televisi

Perekayasa dan Perencanaan Jaringan Seluler

Video Editing

Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisia

Sumber : skkni.kemnaker.go.id, 2023

Informasi dan Komunikasi

SKKNI yang Dicabut

Cloud Computing

Auditor Komunikasi

Penata Suara

Editing Film

Pembuatan Animasi

Teknisi Instalasi Fiber Optik

Programmer Komputer

Sensor Film

Teknisi Telekomunikasi Satelit

Multimedia

Computer Technical Support

Jaringan Komputer dan
Sistem Administrasi

Programmer Komputer

Operator Komputer

Produser Televisi

Perekayasa dan
Perencanaan Jaringan Seluler

Video Editing

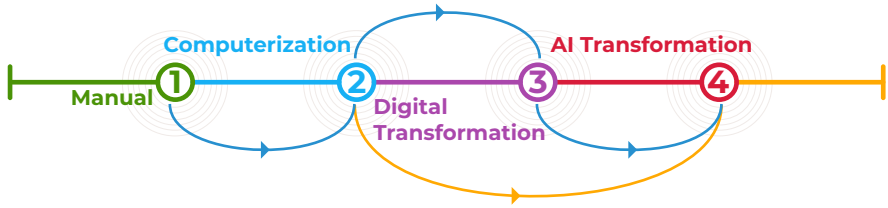
Manajemen Layanan
Teknologi Informasi

Penyiar Televisi dan
Kamerawan Televisia

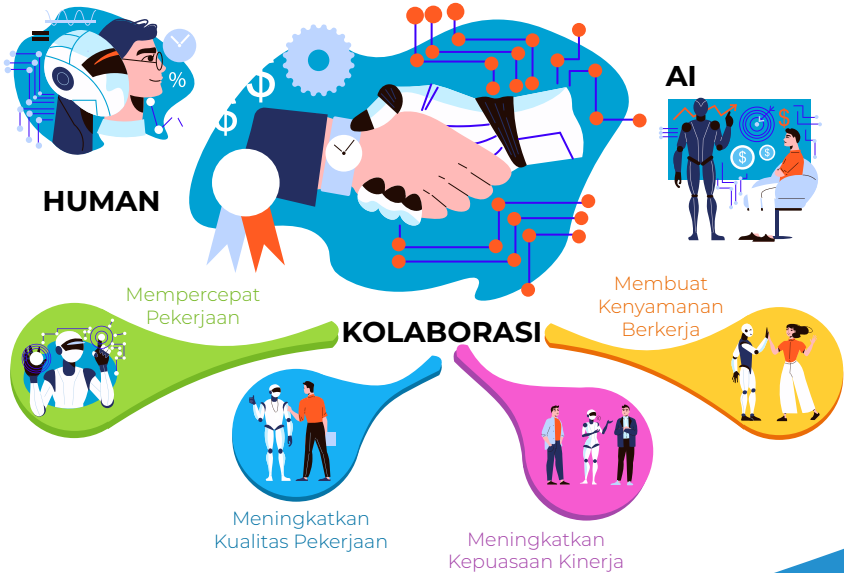
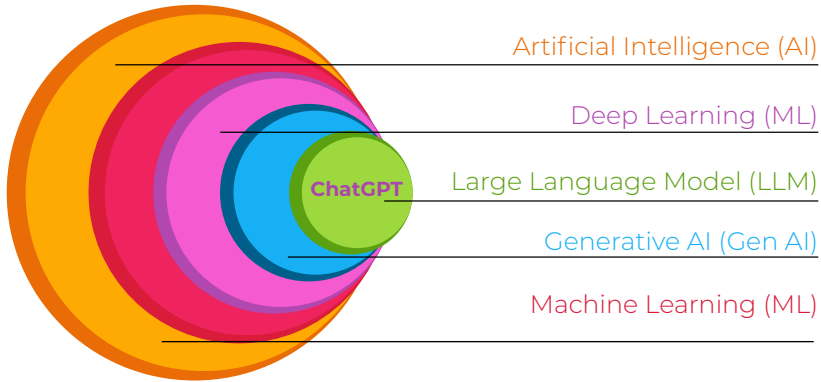
Sumber : skkni.kemnaker.go.id, 2023

PENINGKATAN TEKNOLOGI AI DUNIA DAN REGULASI YANG MENGATUR

Lompatan Peningkatan Teknologi AI Dunia



Lingkaran Teknologi AI Dunia



Sumber: Leapfrog with AI Transformation, GDP Labs, 2023

PENINGKATAN TEKNOLOGI AI DUNIA DAN REGULASI YANG MENGATUR

Contoh Negara yang Mengintervensi Kebijakan dan Peraturan Terkait Teknologi AI



Jenis Kebijakan dan Peraturan Terkait Teknologi AI



Sumber : Kerney, Kominfo, 2023

TANTANGAN UMKM DALAM E-COMMERCE

80%

Pengguna internet ASEAN melakukan pembelian melalui e-Commerce, minimal sebanyak satu kali

350 Juta orang populasi ASEAN adalah pelanggan e-Commerce

440 Juta orang pengguna internet di ASEAN

Sumber : Google, Tamasek dan Bain & Co, 2021



60,4 %

Menghimpun total investasi di Indonesia

60%

96,92 %

Menyerap total tenaga kerja Indonesia

Sumber : Kemenkopukm, 2021

Proporsi Transaksi Ekonomi Digital Indonesia

RP

73,72%

Sektor e-Commerce

Lainnya

Sumber : Kemenkop, Deloitte & business Times, 2021



4,46% eCommerce bertumbuh Pada tahun 2022



9 dari 10 Usaha eCommerce

menggunakan **pesan instan** sebagai media penjualan / promosi / pembelian

Jenis Barang/Jasa yang Banyak Terjual



43,02%

Makanan dan Minuman



15,04%

Fashion



8,11%

Kebutuhan Rumah Tangga



5,86%

Jasa Transportasi



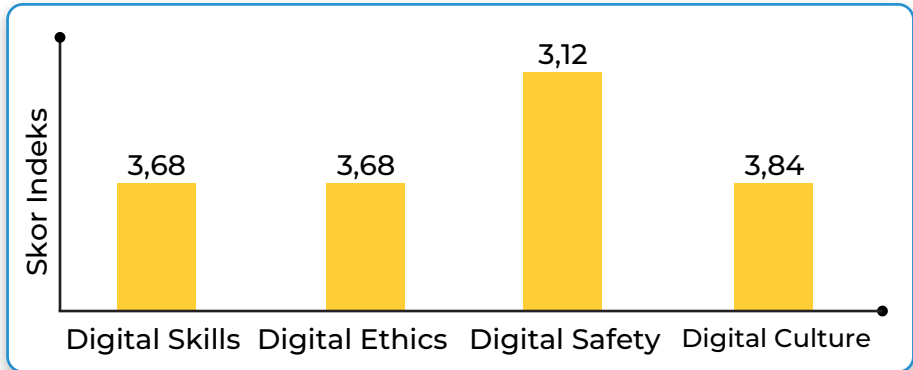
5,37%

Kosmetik

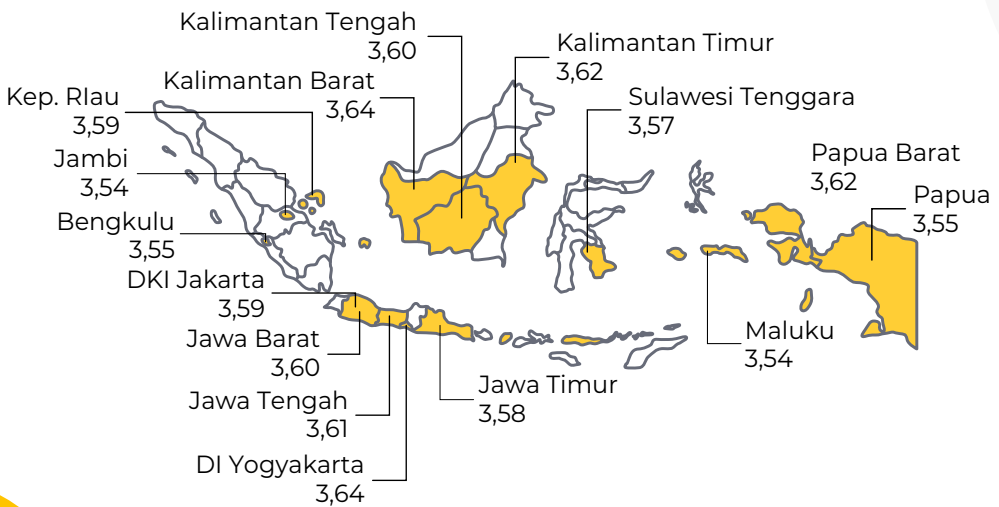
Sumber : BPS, 2023

KONDISI INDEKS LITERASI DIGITAL INDONESIA

4 Pilar Pengukuran Literasi Digital



15 Besar Indeks Literasi Digital Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2022

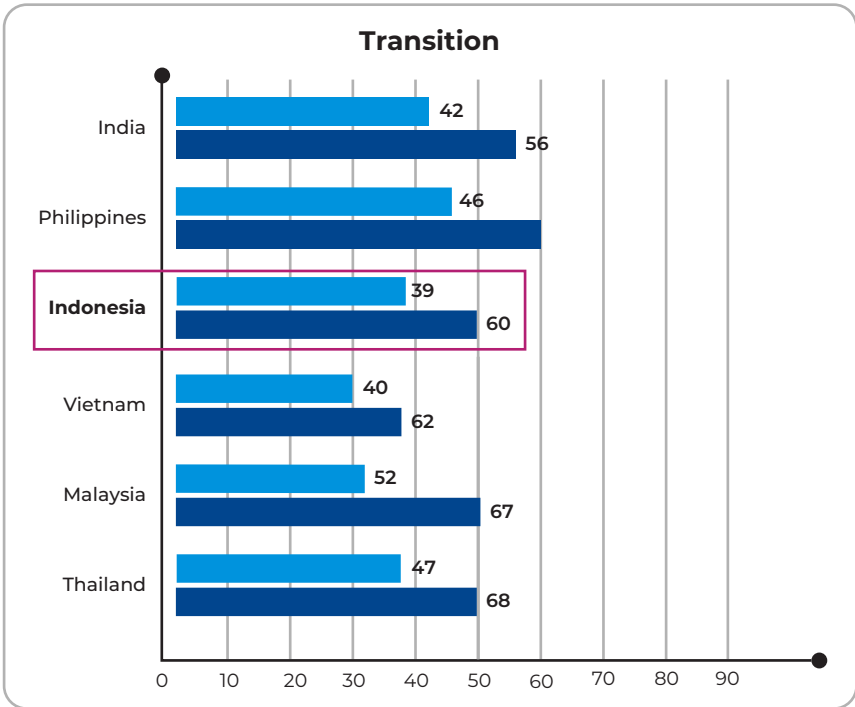
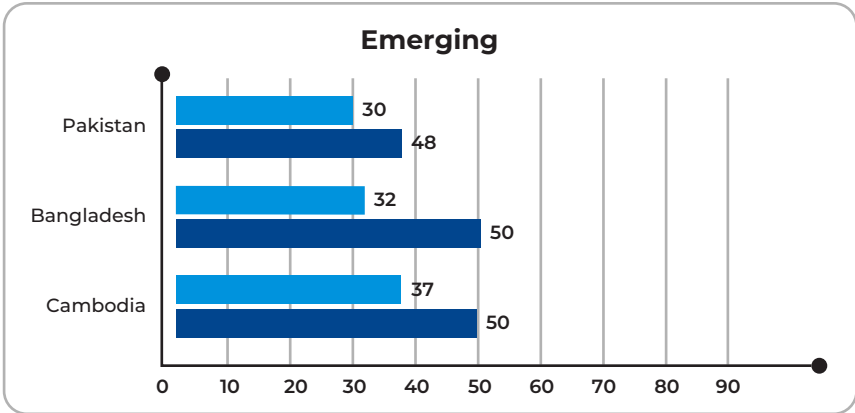


Sumber : Kominfo, 2023

KONDISI INDEKS LITERASI DIGITAL DUNIA

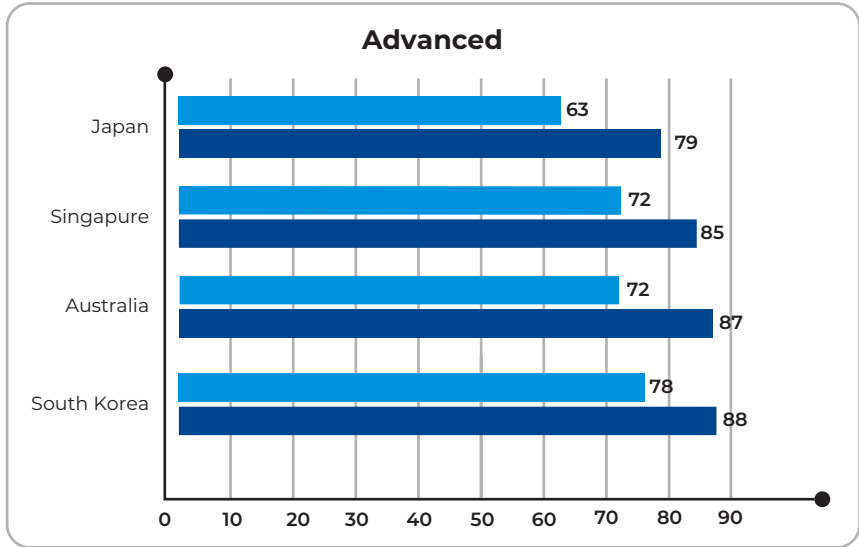
Assessing Progress Along The Digital Society Path

2016 2022



Sumber : Kominfo, 2023

Assessing Progress Along The Digital Society Path



Sumber : Kominfo, 2023



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



*Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110*



@DitjenAptika